



PERUBAHAN
**RENCANA
STRATEGIS**

TAHUN 2021-2026



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DUMAI**



BAPPEDA
KOTA DUMAI

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaborasi



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahuwata'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya perumusan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 dapat disusun dengan baik dan selesai tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

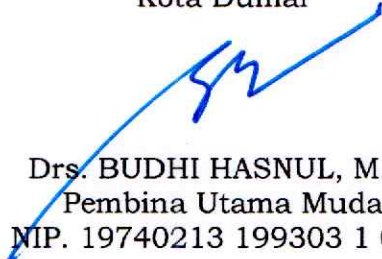
Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis di bidang perencanaan pembangunan, capaian pelayanan Bappeda pada 5 (lima) tahun sebelumnya serta realisasi pelaksanaan dokumen Renstra Bappedalitbang Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2023, tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Bappeda, strategi dan arah kebijakan jangka menengah dalam mencapai tolak ukur keberhasilan pelayanan Bappeda, serta program dan kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Dumai Tahun 2021-2026. Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda dilakukan sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026.

Dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) dan digunakan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja pelayanan Bappeda dalam rangka mendukung pencapaian Misi Keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 **“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”** khususnya di bidang perencanaan Pembangunan daerah.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen Perubahan Renstra

Bappeda ini, terutama kepada seluruh pegawai Bappeda yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh tahapan penyusunan dokumen dapat dilaksanakan dengan baik.

Dumai, 15 Januari 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Dumai



Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740213 199303 1 002



BAPPEDA KOTA DUMAI

BerAKHLAK **#** bangga
melayani
bangsa

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-3
3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappedalitbang Provinsi Riau	III-5
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Rencana Sektor Lainya	III-6
3.5. Penetapan Isu-Isu Strategis	III-10
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1

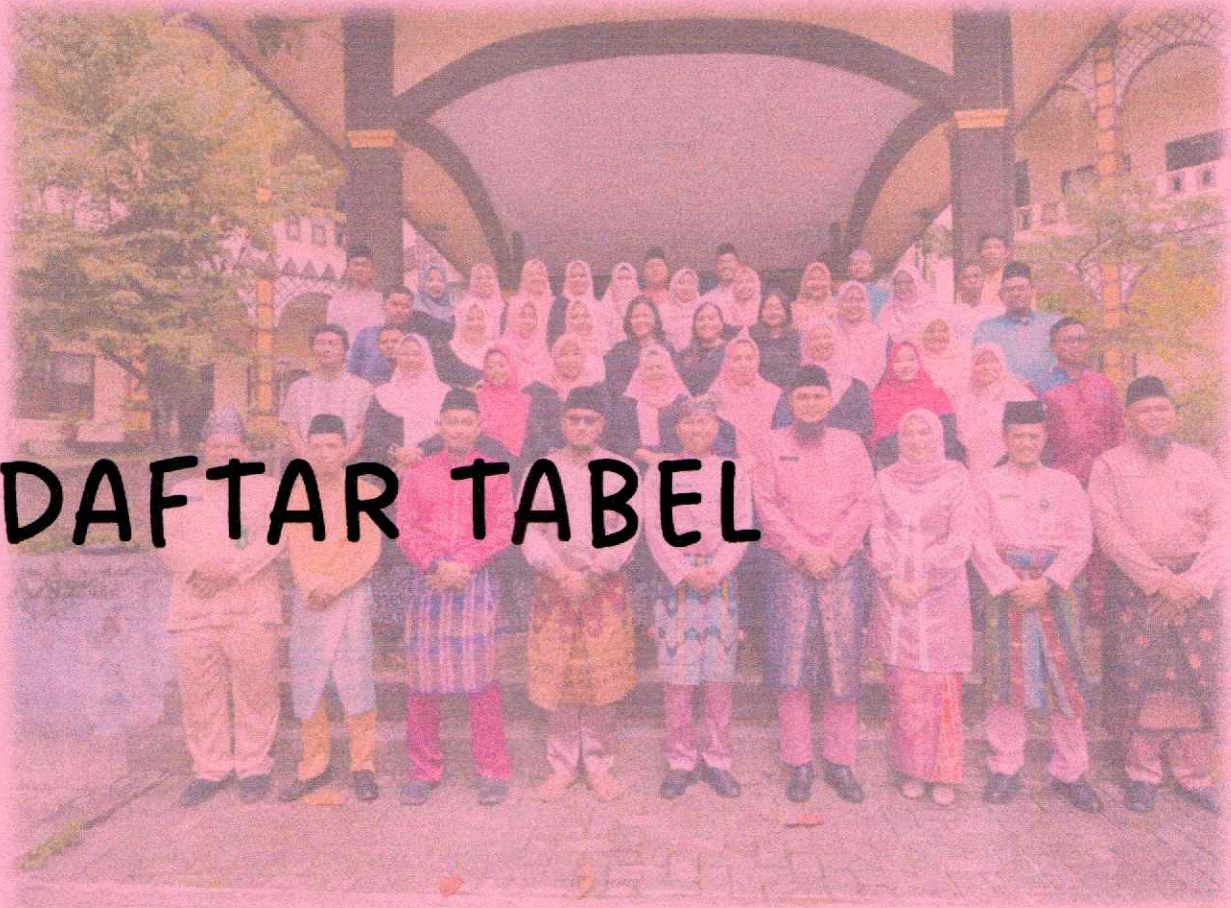
DAFTAR ISI

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1
 LAMPIRAN		



BAPPEDA KOTA DUMAI

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	II-16
Tabel 2.2.	Jumlah PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Berdasarkan Pendidikan Formal	II-17
Tabel 2.3.	Jumlah PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Berdasarkan Kedudukan	II-18
Tabel 2.4.	Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai	II-19
Tabel 2.5.	(T-C.23) Target dan Tingkat Capaian Masing-Masing Indikator Kinerja Bappeda Tahun 2016-2021	II-22
Tabel 2.6.	(T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021	II-23
Tabel 2.7.	Pengukuran dengan Skala Ordinal	II-24
Tabel 3.1.	(T-B35) Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-2
Tabel 3.2.	Pemetaan Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Berkaitan dengan Sasaran Bappenas serta Sasaran Bappedalitbang Provinsi Riau	III-6
Tabel 4.1.	(T-C.25) Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026	IV-2
Tabel 5.1.	(T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V-3
Tabel 6.1.	(T-C.27) Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026	VI-3
Tabel 7.1.	(T-C.28) Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran	VII-2
Tabel 7.2.	Kerangka Kerja Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) untuk Pemerintah Daerah	VII-3
Tabel 7.3.	Instrumen Pengukuran Kualitas Kebijakan untuk Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Daerah	VII-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Bappeda Kota Dumai	II-2
Gambar 2.2.	PNS Bappeda Menurut Golongan/Ruang dan Jenis Kelamin.....	II-17
Gambar 2.3.	PNS Bappeda Menurut Pendidikan Formal	II-17
Gambar 2.4.	PNS Bappeda Menurut Kedudukan	II-18
Gambar 3.1.	Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	III-7



BAPPEDA KOTA DUMAI

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaborasi



BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pada setiap tahap pelaksanaan Pembangunan daerah, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka Panjang selalu didahului dengan tahapan perencanaan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 definisi dari Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan

masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setelah RPJMD ditetapkan melalui peraturan daerah, maka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada RPJMD dimaksud. Lebih rinci di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 124 ditegaskan bahwa paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan maka Renstra Perangkat daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah menerapkan ketentuan mutatis mutandis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 359. Proses penyusunan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan Renstra Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2021-2026, Pemerintah Kota Dumai melakukan Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai dan secara bersamaan juga melakukan perubahan atas peraturan daerah Kota Dumai nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Sehubungan dengan perubahan susunan perangkat daerah

tersebut, Bappedalitbang Kota Dumai termasuk salah satu yang mengalami perubahan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda). Berkenaan dengan perubahan SOT dan RPJMD tersebut, maka telah dilakukan evaluasi yang menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan Renstra mengikuti Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Evaluasi mengidentifikasi beberapa penyesuaian yang harus dilakukan mengikuti perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi Riau dan pemerintah Kota Dumai.

Perubahan kebijakan nasional pada lingkup peraturan perundang-undangan perencanaan dan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi dasar normatif yang perlu dipenuhi. Indikator kinerja daerah penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 sebagai acuan, perlu ditindaklanjuti dalam Indikator Kinerja Utama Kepala Bappeda Kota Dumai dalam Perubahan Renstra Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Adapun proses penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Perubahan Renstra Bappeda;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Bappeda;
- c. Penyusunan Rancangan Renstra Bappeda;
- d. Verifikasi Rancangan Renstra oleh Bappedalitbang;
- e. FGD Rancangan Renstra Bappeda dengan Bappedalitbang Kota Dumai;
- f. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Bappeda;
- g. Penetapan Perubahan Renstra Bappeda.

Renstra Bappeda Kota juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappedalitbang Provinsi Riau dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Bappeda yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Perubahan Renstra Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 104, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) serta dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5887) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 13 Seri D);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Perubahan Renstra Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda setiap tahunnya selama periode tahun 2022-2026. Selain itu, Rencana Strategis Bappeda dimaksudkan untuk memberikan pedoman umum (*guide line*) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bappeda dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyusun berbagai

kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Dumai.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan Renstra Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan kerja Bappeda dalam rangka sinergitas dan integrasi perencanaan pembangunan di daerah;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Dumai terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan; dan
5. Menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja Bappeda, serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, serta keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, dan dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum;

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan;

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra.

1.4. Sistematika Penulisan;

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;**

Memuat penjelasan umum tentang:

1. Dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Struktur organisasi Perangkat Daerah, ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah;

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas dan Renstra Bappedalitbang Propinsi Riau, hasil telaah terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Menyajikan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menyajikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel 3.1), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah;
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
4. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya kemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada Bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, beserta indikator kinerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP



BAPPEDA
KOTA DUMAI

BerAKHLAK **#** bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaborasi



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

BAB II

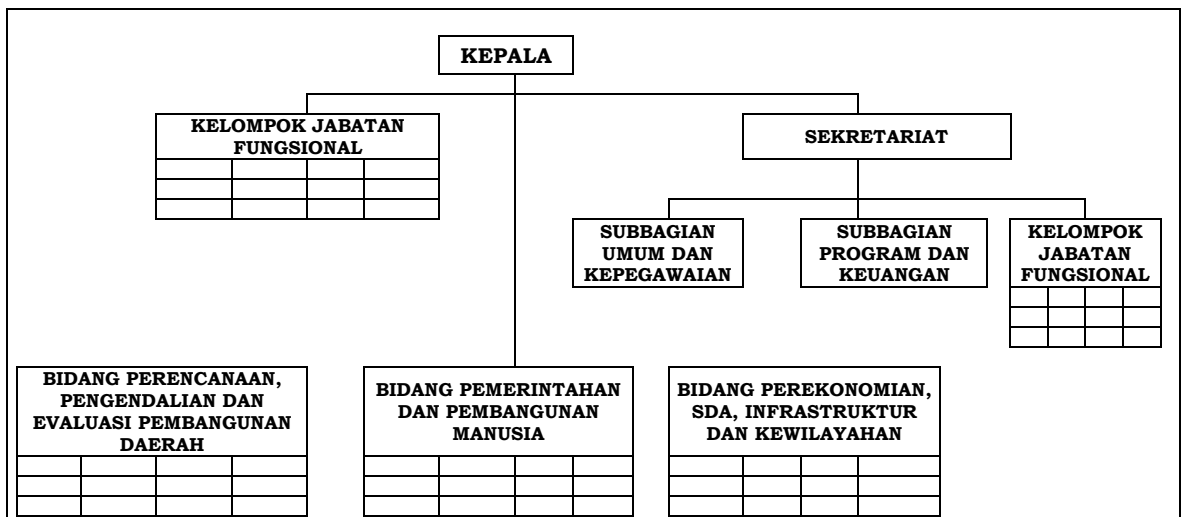
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai merupakan salah satu badan daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (BAPPEDA) adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai masuk ke dalam klasifikasi tipe B, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.

Kemudian untuk melaksanakan amanat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai. Menurut peraturan tersebut Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Bappeda Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 2.1. dibawah ini.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bappeda Kota Dumai
Sumber: Lampiran Peraturan Walikota Dumai Nomor 82 Tahun 2023

Bappeda melaksanakan tugas membantu Wali Kota untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan pemerintahan bidang Perencanaan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bappeda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau perencanaan tahunan;

- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, politik, bottom up top down dan partisipatif;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergis perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional, perencanaan provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja lainnya;
- d. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan kinerja perangkat daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, bimbingan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- i. penyusunan rencana secara makro kawasan strategis, kawasan khusus, kawasan pertumbuhan, kawasan kumuh dan sejenisnya dalam perencanaan pembangunan daerah;
- j. perumusan penelitian, riset, kajian dan kerjasama pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
- k. pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyebaran informasi pembangunan daerah;
- l. penyusunan profil, penyebaran informasi dan publikasi perencanaan pembangunan daerah;
- m. penyusunan Rencana induk (master plan), rencana aksi serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- n. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program/kegiatan dan penganggaran badan;
- o. pelaksanaan, bimbingan, pengendalian monitoring dan evaluasi kesekretariatan meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan aset; dan
- p. penyiapan fungsi lain yang diberikan Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai membawahi 1 sekretariat dan 3 bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. *Sekretariat;*

Sekretariat melaksanakan tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik daerah dan kerumahtanggaan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:

pengoordinasian kegiatan di Badan;

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan;
- b. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- f. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala.

Susunan Organisasi Sekretariat terbagi atas:

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Subbagian Program dan Keuangan; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud diatas melaksanakan tugas:

1. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
2. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas Badan;
3. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Badan;
4. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas Badan;
5. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
6. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
7. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
8. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
9. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud diatas melaksanakan tugas:

1. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan;
3. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan;

4. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan;
 5. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan;
 6. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 7. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
 8. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 9. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baikun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 10. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
 11. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 12. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya pengelolaan aset daerah;
 13. menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
 14. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga; dan
 15. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
2. *Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.*

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan tugas menyiapkan perumusan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi, pendanaan, pelaporan kinerja perencanaan dan pembangunan daerah.

Uraian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan dan indikator ekonomi) melalui pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial;
2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
3. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
4. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
5. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
6. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka harmonisasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan program pembangunan dengan Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya serta Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
7. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
8. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
9. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
10. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar

program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

11. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
12. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
13. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
14. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
15. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
16. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
17. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
18. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
19. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
20. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
21. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
22. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
23. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
24. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;

25. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
26. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
27. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
28. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
29. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
30. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala yang dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;

- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
 - p. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai fungsinya.
3. *Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.*

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan tugas perumusan perencanaan, mengoordinasikan, pembinaan dan mengendalikan perencanaan pembangunan meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas), sosial, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata; dan unsur penunjang urusan pemerintahan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, unsur pengawasan pemeritahan daerah;

unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik serta unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat Daerah.

Uraian tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
2. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
4. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
5. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
6. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
7. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
8. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
9. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
10. menyiapkan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
11. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan; dan
12. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala yang dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
 - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional terkait bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 - j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dilingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - k. mengoordinasikan penyusunan rencana induk dan rencana aksi terkait perencanaan pembangunan daerah; dan
 - l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai fungsinya.
4. *Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.*

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan melaksanakan tugas menyiapkan pengoordinasian perumusan perencanaan pembangunan daerah, meliputi urusan pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan

dan penataan ruang, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; dan unsur kewilayahan, serta unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat DPRD.

Uraian tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
2. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
4. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
5. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
6. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
7. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
8. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
9. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
10. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
11. mengkoordinasikan penyusunan rencana induk dan rencana aksi terkait perencanaan pembangunan daerah;
12. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan; dan

13. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala yang dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi dokumen rencana umum tata ruang, kawasan strategis dan/atau rencana induk sektoral skala kota;
- l. melaksanakan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota di lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;

- m. penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pembangunan daerah;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian serta Pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Perekonomian, Sumber Daya Alam,Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- o. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai fungsinya.

5. *Kelompok Jabatan Fungsional*

Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi dan dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah. Tim kerja terdiri atas, (a) ketua tim; dan (b) anggota tim.

Penugasan Ketua tim yang berasal dari pejabat fungsional memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisasi lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan substansi bidang tugas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

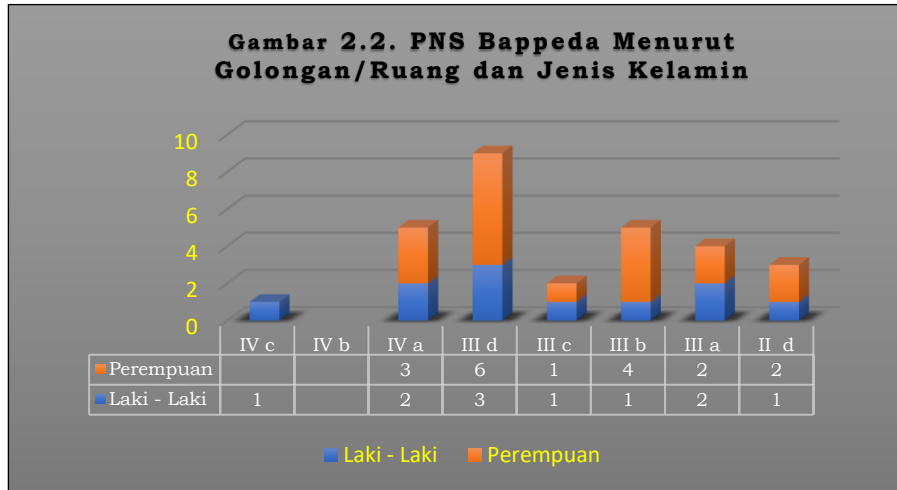
Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai per 1 Januari 2024 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang, terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) orang PNS dan 40 (empat puluh) orang THL. Jumlah PNS laki-laki sebanyak 11 (sebelas) orang (37,93%) dan perempuan sebanyak 18 (delapan belas) orang (62,07%). Berdasarkan golongan/ruang dan kepangkatan, pegawai PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai golongan yang cukup bervariasi dari golongan II sampai golongan IV. Pegawai dengan jumlah terbanyak terdapat pada golongan III yaitu sebanyak 20 (dua puluh) orang (68,97%), kemudian diikuti oleh golongan IV sebanyak 6 (enam) orang (20,69%), golongan II sebanyak 3 (tiga) orang (10,34%). Kondisi PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.1. dibawah. Sedangkan untuk pendidikan formal PNS Sebagian besar adalah Pendidikan sarjana S1 berjumlah 17 orang (58,62%), S2 berjumlah 8 (delapan) orang (27,59%), SLTA/Sederajat berjumlah 3 (tiga) orang (10,34%) dan D3 berjumlah 1 (satu) orang (3,45%).

- Kondisi PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.1. dan Grafik 2.1. dibawah ini.

Tabel 2.1.
Jumlah PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Golongan/ Ruang	Kepangkatan	Jumlah PNS (Orang)	
			Laki-Laki	Perempuan
1.	IV/c	Pembina Utama Muda	1	
	IV/b	Pembina Tingkat I		
	IV/a	Pembina	2	3
2.	III/d	Penata Tingkat I	3	6
	III/c	Penata	1	1
	III/b	Penata Muda Tingkat I	1	4
	III/a	Penata Muda	2	2
3.	II/d	Pengatur Tingkat I	1	2
Jumlah			11	18

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Bappeda Kota Dumai Tahun 2024

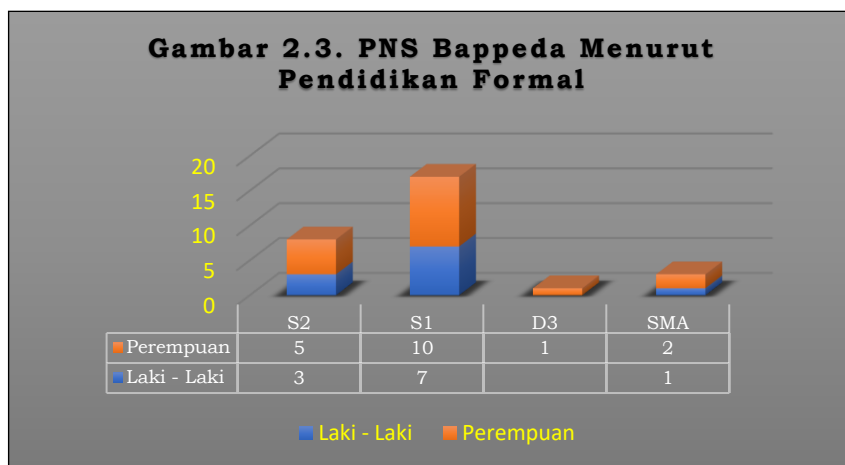


- Kondisi PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai berdasarkan Pendidikan formal dapat dilihat pada Tabel 2.2. dan Grafik 2.2. dibawah ini

Tabel 2.2.
Jumlah PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Berdasarkan Pendidikan Formal

No.	Pendidikan Formal	Jumlah PNS (Orang)	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Strata 2 (S2)	3	5
2.	Strata 1 (S1)	7	10
3.	Diploma 3 (D3)		1
4.	SMA/Sederajat	1	2
Jumlah		11	18

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Bappeda Kota Dumai Tahun 2024



- Jika dilihat dari kedudukan maka jumlah ASN Bappeda Kota Dumai yang menduduki jabatan Eselon sebanyak 7 (tujuh) orang (24,14%),

Fungsional Perencana 12 (dua belas) orang (41,38%), serta fungsional umum berjumlah 10 (sepuluh) orang (34,48). Kondisi PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai berdasarkan kedudukan dapat dilihat pada Tabel 2.3. dan Grafik 2.3 berikut.

Tabel 2.3.
Jumlah PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Berdasarkan Kedudukan

No.	Pangkat/Kedudukan	Jumlah PNS (Orang)	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Eselon II.b (Jabatan Tinggi Pratama)	1	
2.	Eselon III.a (Jabatan Administrator)	1	
3.	Eselon III.b (Jabatan Administrator)	1	2
4.	Eselon IV.a (Jabatan Pengawas)	2	
5.	Fungsional Perencana Ahli Madya	1	
6.	Fungsional Perencana Ahli Muda	1	8
7.	Fungsional Perencana Ahli Pertama		2
8.	Fungsional Umum	3	7
Jumlah		11	18

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Bappeda Kota Dumai Tahun 2024



Dalam menjalankan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai tidak memiliki unit usaha. Demi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, maka terdapat beberapa

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

sarana/prasarana kerja di BAPPEDA Kota Dumai, sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.4. dibawah ini.

Tabel 2.4.
Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

No.	Uraian	Jumlah Barang	Nilai (Rp.)
1	2	3	4
1.3.	ASET TETAP		
1.3.1	ASET TETAP - TANAH		
1.3.1.01	Tanah		
1.3.2	ASET TETAP – PERALATAN DAN MESIN	929	8.063.687.839,00
1.3.2.01	Alat Besar	1	199.860.000,00
1.3.2.02	Alat Angkutan	23	2.357.610.925,00
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	27	160.011.150,00
1.3.2.04	Alat Pertanian		
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	591	2.460.828.414,00
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	80	794.279.100,00
1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan		
1.3.2.08	Alat Laboratorium		
1.3.2.09	Alat Persenjataan	1	19.514.000,00
1.3.2.10	Komputer	205	2.069.384.250,00
1.3.2.11	Alat Eksplorasi		
1.3.2.12	Alat Pengeboran		
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi		
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja		
1.3.2.16	Alat Peraga		
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi		
1.3.2.18	Rambu - Rambu		
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	1	2.200.000,00
1.3.3	ASET TETAP – GEDUNG DAN BANGUNAN	4	7.683.731.972,26
1.3.3.01	Bangunan Gedung	4	7.683.731.972,26
1.3.3.02	Monumen		
1.3.3.03	Bangunan Menara		
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti		
1.3.4	ASET TETAP - JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	1	10.000.000,00
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan		
1.3.4.02	Bangunan Air	1	10.000.000,00
1.3.4.03	Instalasi		
1.3.4.04	Jaringan		
1.3.5	ASET TETAP – ASET TETAP LAINNYA	1	5.000.000,00
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan		
1.3.5.02	Barang Bercorak		
	Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga		
1.3.5.03	Hewan		
1.3.5.04	Biota Perairan		
1.3.5.05	Tanaman	1	5.000.000,00
1.3.5.06	Barang Koleksi non Budaya		
1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi		
1.5.	ASET LAINNYA	40	524.394.050,00
1.5.2.01	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		
1.5.3.01	Aset Tidak Berwujud	2	49.000.000,00
1.5.4.01	Aset Lain-Lain (ARB)	38	475.394050,00
TOTAL		975	16.286.813.861,26

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB) Bappeda Tahun 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dapat dilihat dari pencapaian setiap indikator kinerja pelayanan, seperti Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP) maupun pencapaian realisasi anggaran.

Selama periode 2016-2021 Bappeda Kota Dumai telah menyelenggarakan pelayanan di bidang perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna. Penetapan indikator kinerja dirumuskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pada Tabel 4.1. Dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 terdapat beberapa indikator tujuan dan sasaran Bappeda untuk jangka menengah Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen jangka panjang, menengah dan tahunan;
2. Proporsi usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD;
3. Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; dan
4. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD.

Disamping penjabaran indikator yang ada pada dokumen Renstra tersebut juga terdapat beberapa indikator tambahan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Dumai Nomor 05.a/Bappeda/2021 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021, yang anatara lain adalah:

1. Hasil penilaian kualitas perencanaan pembangunan daerah (PPD) Tingkat Provinsi Riau;
2. Persentase capaian target IKU RPJMD;
3. Proporsi usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD;
4. Persentase dukungan Rencana Kerja Pembangunan Daerah terhadap prioritas nasional;
5. Persentase dukungan Rencana Kerja Pembangunan Daerah terhadap prioritas Provinsi Riau; dan
6. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD.

Adapun target dan tingkat capaian untuk masing-masing indikator kinerja Bappeda tersebut pada tahun 2016-2021 berdasarkan hasil hasil

evaluasi terhadap indikator-indikator kinerja tersebut tersaji pada Tabel 2.5. (Tabel T-C.23.) dibawah.

Untuk mendukung kinerja tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai juga mendapat dukungan dana dan merealisasikannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Realiasi anggaran untuk periode tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.6. (T-C.24) dibawah ini.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

**Tabel 2.5. (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					Ket
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Tersedianya dokumen jangka panjang, menengah dan tahunan			ada	ada	ada	ada	ada	N/A	N/A	ada	ada	ada	N/A	N/A	100%	100%	100%	
2.	Proporsi usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD			15%	20%	25%	30%	35%	N/A	N/A	37,23%	39,50%	20,36%	N/A	N/A	148,92%	131,67%	58,17%	
3.	Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA			2 dok	3 dok	2 dok	2 dok	3 dok	N/A	N/A	2 dok	2 dok	3 dok	N/A	N/A	100%	100%	100%	
4.	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD			100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	99,44%	96,65%	99,83%	N/A	N/A	99,44%	96,65%	99,83%	
5.	Hasil penilaian kualitas perencanaan pembangunan daerah (PPD) Tingkat Provinsi Riau							Peringkat 1					Peringkat 1					100%	IKU
6.	Persentase capaian target IKU RPJMD							100%					100%					100%	IKU
7.	Persentase dukungan Rencana Kerja Pembangunan Daerah terhadap prioritas nasional							100%					100%					100%	IKU
8.	Persentase dukungan Rencana Kerja Pembangunan Daerah terhadap prioritas Provinsi Riau							100%					100%					100%	IKU

Sumber: Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 dan LKjIP Bappeda Tahun 2020 dan 2021

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 2.6. (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
BELANJA	14.945.100.345	16.472.917.399	22.250.020.025	18.125.380.064	11.158.940.433	13.666.958.629	14.636.282.682	20.442.009.286	16.239.229.037	8.821.209.909	91,45	88,85	91,87	89,59	79,05	-25,33	-35,46
Belanja Tidak Langsung	3.530.454.770	3.734.977.010	6.300.867.650	5.887.157.650		3.356.870.497	3.721.428.014	5.746.786.178	5.212.421.060		95,08	99,64	91,21	88,54			
Belanja Pegawai	3.530.454.770	3.734.977.010	6.300.867.650	5.887.157.650		3.356.870.497	3.721.428.014	5.746.786.178	5.212.421.060		95,08	99,64	91,21	88,54			
Belanja Langsung	11.414.645.575	12.737.940.389	15.949.152.375	12.238.222.414		10.310.088.132	10.914.854.668	14.695.223.108	11.026.807.977		90,32	85,69	92,14	90,10			
Belanja Pegawai	5.607.404.770	5.466.897.010	6.300.867.650	5.887.157.650		5.325.670.497	5.047.678.014	5.746.786.178	5.212.421.060		94,98	92,33	91,21	88,54			
Belanja Barang dan Jasa	5.319.290.805	6.964.823.379	8.916.207.725	5.844.339.964		4.572.133.635	5.721.424.454	8.241.535.538	5.353.761.417		85,95	82,15	92,43	91,61			
Belanja Modal	487.950.000	306.220.000	732.077.000	506.724.800		412.284.000	145.752.200	706.901.392	460.625.500		84,49	47,60	96,56	90,90			
Belanja Operasi					10.941.737.073					8.608.528.549					78,68		
Belanja Pegawai					6.137.711.787					5.092.410.156					82,97		
Belanja Barang dan Jasa					4.804.025.286					3.516.118.393					73,19		
Belanja Modal					217.203.360					212.681.360					97,92		
Belanja Tanah																	
Belanja Peralatan dan Mesin					217.203.360					212.681.360					97,92		
Belanja Gedung dan Bangunan					0					0							
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan					0					0							
Belanja Aset Tetap Lainnya					0					0							

Sumber: Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 dan LKJIP Bappeda Tahun 2020 dan 2021 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bappeda Tahun 2021

Dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap sasaran, digunakan metode rata-rata capaian setiap indikator sasaran yang selanjutnya dikategorikan dalam pengukuran dengan skala ordinal sebagaimana pada tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90,99%	Tinggi
66% ≤ 75,99%	Sedang
51% ≤ 65,99%	Rendah
≤ 50,99%	Sangat Rendah

Jika dilihat realisasi capaian kinerja untuk masing-masing indikator pada tabel 2.5. dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar kinerja pelayanan Bappeda Kota Dumai pada Tahun 2016-2021 realisasinya “*Sangat Tinggi*” dengan interval 91%-100%. Tetapi pada tahun 2021 terdapat indikator “*Proporsi usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD*” pada tahun 2021 rasio capaiannya “*Rendah*” yaitu sebesar 58,17%, hal ini disebabkan karena semakin banyaknya usulan masyarakat yang disampaikan pada tahapan perencanaan pembangunan secara partisipatif seperti pada saat musrenbang, mulai dari musrenbang tingkat kelurahan sampai musrenbang tingkat kota, sedangkan pagu yang tersedia pada saat penyusunan RKPD tidak mampu mengakomodir usulan tersebut sesuai dengan persentase yang ditargetkan.

Sedangkan untuk realisasi anggaran secara keseluruhan Bappeda masih berada pada kriteria “*tinggi*” dan “*sangat tinggi*” dengan interval 76%-90,99% serta 91%-100%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dari hasil analisis terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021-2026, Renstra Bappeda Provinsi Riau Tahun 2019-2024, RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan

pelayanan Bappeda Kota Dumai pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Tantangan

Beberapa tantangan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai selama periode jangka menengah Tahun 2021-2026 antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam perencanaan pembangunan daerah;
2. Kurang validnya data dan informasi sebagai *baseline* data perencanaan;
3. Rendahnya komitmen OPD untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu;
4. Masih tingginya ego sektoral dari instansi diluar Bappeda terutama terkait pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat teknis;
5. Masih rendahnya kemampuan pembiayaan pemerintah pusat, provinsi maupun pendapatan asli daerah;
6. Minimnya aparatur perencana yang dimiliki Bappeda maupun OPD di Kota Dumai;
7. Kurang cermatnya pelaksana teknis kegiatan dalam membuat rencana kegiatan anggaran;
8. Perkembangan teknologi informasi yang cepat dan tak terbatas belum mampu dimanfaatkan secara tepat untuk menghasilkan pembangunan yang berdaya guna dengan pelibatan seluruh pelaku pembangunan;
9. Masih rendahnya komitmen pelaku pembangunan untuk saling bersinergi menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan; dan
10. Masih minimnya kemampuan para aparatur perencana untuk menggali potensi-potensi daerah yang dapat dikembangkan.

b. Peluang

Adapun peluang yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai selama periode jangka menengah Tahun 2021-2026 antara lain sebagai berikut:

1. Kepedulian para pelaku pembangunan terhadap pesatnya teknologi informasi membuat semakin tingginya kesadaran para pelaku

pembangunan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;

2. Adanya kebijakan otonomi daerah membuat pembangunan lebih tepat sasaran dan lebih sesuai dengan kebutuhan daerah;
3. Semakin tingginya komitmen OPD untuk saling berintegrasi dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
4. Semakin tingginya kesadaran para pelaku pembangunan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
5. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sebagai bukti tingginya kepedulian masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan; dan
6. Semakin tingginya tingkat pendidikan para pelaku pembangunan berkorelasi positif terhadap semakin berkualitasnya hasil-hasil pembangunan.



BAPPEDA
KOTA DUMAI

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB III
PERMASALAHAN DAN
ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, secara umum telah mengubah pola perencanaan dari *shopping list* ke *working plan*. Dalam pola *working plan* Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif. Perencanaan tersebut merupakan hasil dari proses perencanaan yang memadukan proses teknokratik, partisipatif, politis, serta proses *bottom-up* dan *top down*. Melalui keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini belum optimal (hanya sebagai pelengkap) dalam proses perencanaan. Indikasinya antara lain ditandai masih adanya kesenjangan realisasi Daftar Usulan Rencana Program/Kegiatan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang dapat diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini. Bappeda memiliki peran sangat penting dan utama dalam menjaga konsistensi dokumen perencanaan pembangunan di daerah. Peran penjaminan mutu ini membutuhkan dukungan yang utuh dari segenap pemangku kepentingan.

Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat daerah digunakan untuk menentukan program Perangkat Daerah yang tepat sebagai solusi

terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, permasalahan yang dihadapi Bappeda Kota Dumai antara lain:

1. Ketersediaan data sebagai dasar perencanaan belum memadai;
2. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
3. Proses perencanaan pembangunan daerah belum konsisten dan terintegrasi;
4. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antar pemerintahan antar sektor, dan antar pemangku kepentingan lainnya belum optimal;
5. Pengembangan dan penerapan inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah belum optimal.

Pada Tabel 3.1. berikut digambarkan beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

**Tabel 3.1. (T-B35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketersediaan data sebagai dasar perencanaan belum memadai.	Lemahnya kemampuan perangkat daerah sebagai sumber informasi dalam menyediakan informasi yang valid dan tepat waktu	Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang statistik dan pengolahan data di beberapa perangkat daerah penyedia data.
2.	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.	Perencanaan yang disusun belum sepenuhnya menggambarkan kondisi existing dan mampu memberikan solusi yang tepat saran	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya jumlah tenaga perencana yang bertugas di Bappeda. • Masih lemahnya kualitas SDM Bappeda dalam mengidentifikasi permasalahan dalam menyusun perencanaan secara menyeluruh. • Masih kurangnya jumlah SDM Bappeda dalam melaksakan koordinasi dengan beberapa perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan tingkat kota maupun tingkat perangkat daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3.	Proses perencanaan pembangunan daerah belum konsisten dan terintegrasi	Substansi tahapan proses perencanaan belum dipahami secara komprehensif oleh seluruh stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya • Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah belum sepenuhnya selaras dengan visi dan misi kepala daerah • Rencana pembangunan daerah belum sepenuhnya mengacu pada konsep tematik-holistik-integratif dan berbasis spasial
4.	Sinkronisasi perencanaan pembangunan antar pemerintahan antar sektor, dan antar pemangku kepentingan lainnya belum optimal.	Belum optimalnya sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antara pemerintah kota dengan pemerintah pusat dan propinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan regulasi proses perencanaan dan penganggaran di Daerah. • Perbedaan waktu proses perencanaan dan penganggaran antara Pusat dan Daerah.
5.	Pengembangan dan penerapan inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah belum optimal.	Belum masifnya sosialisasi mengenai inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah	Pelaksana belum memahami pentingnya inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengacu kepada Visi RPJMN dan Visi Propinsi Riau serta bertolak pada kondisi eksisting maka ditetapkan Visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka telah ditetapkan 4 (Empat) Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu;
3. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas; dan
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Dalam menjalankan tugasnya, Bappeda Kota Dumai memiliki tugas dan fungsi seperti yang telah dijelaskan pada Bab II dokumen Perubahan Renstra ini. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda mendukung pencapaian Misi keempat RPJMD “*Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik*”.

Adapun program prioritas yang direncanakan untuk mendukung pencapaian misi keempat tersebut yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda diantaranya:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan seperti yang tersaji pada Tabel 3.1 diatas, terdapat beberapa faktor-faktor penghambat sekaligus pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Faktor penghambat

Faktor penghambat yang berasal dari internal organisasi antara lain :

- a. Belum ada standar kompetensi ASN yang menangani perencanaan;
- b. Rendahnya motivasi kerja ASN yang menangani perencanaan;
- c. Penguasaan aparatur terhadap aturan yang berlaku masih rendah;

Faktor penghambat yang berasal dari eksternal organisasi antara lain :

- a. Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan masih rendah;
- b. Peran serta sektor swasta dalam pembangunan masih rendah.

2. Faktor pendorong

Faktor pendorong yang berasal dari internal organisasi antara lain :

- a. Tersedianya ASN yang menduduki jabatan perencana, dan Fungsional perencana;
- b. Adanya reward dari Bappenas terkait proses perencanaan dan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk penghargaan pembangunan daerah;

- c. Telah diimplementasikannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang berbasis teknologi informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan serta dalam pengendalian dan evaluasi Pembangunan.

Faktor pendorong yang berasal dari eksternal organisasi antara lain :

- a. Kondisi ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat yang aman dan terkendali sebagai modal dasar pembangunan.

3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappedalitbang Provinsi Riau

Dalam menyusun dokumen rencana strategis ini, perlu dikemukakan juga faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda Kota Dumai yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda melalui telaahan terhadap sasaran jangka menengah rencana strategis Bappenas maupun Bappeda Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, terdapat 4 (Sasaran) sasaran jangka menengah Renstra Bappenas, diantaranya:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional;
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional;
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner;
4. Terwujudnya kinerja kementerian PPN/BAPPENAS yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Adapun sasaran jangka menengah Renstra Bappedalitbang Provinsi Riau berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Strategis Bappedalitbang Provinsi Riau Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Akuntabel;

Rangkuman sasaran Bappenas dan Sasaran Bappeda Provinsi dikaitkan dengan faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelayanan Bappeda ditampilkan dalam Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2.
Pemetaan Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Berkaitan dengan Sasaran Bappenas serta Sasaran Bappedalitbang Provinsi Riau

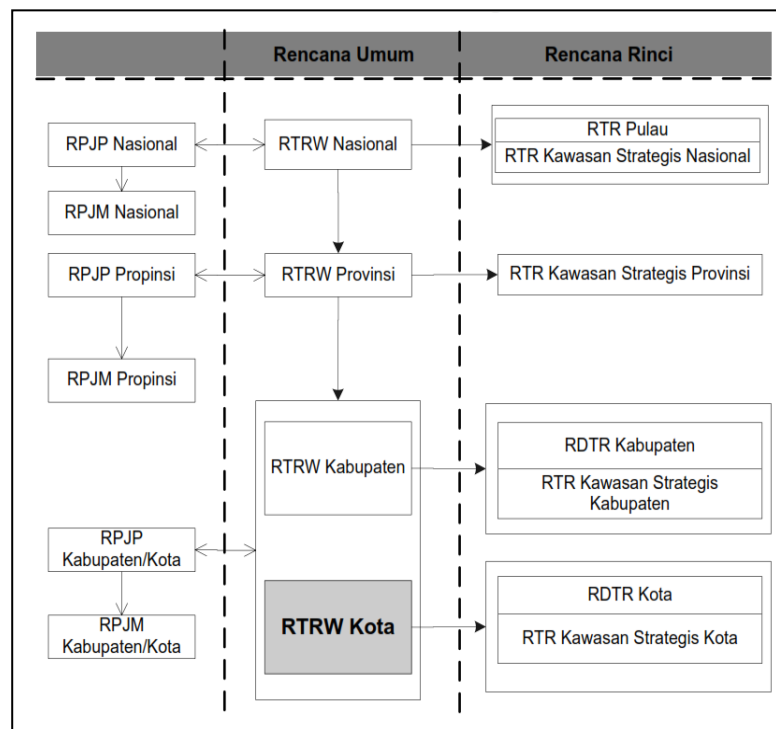
SASARAN BAPPENAS	SASARAN BAPPEDALITBANG PROVINSI RIAU	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG
1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional; 2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional. 3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner 4. Terwujudnya kinerja kementerian PPN/BAPPENAS yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	1. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Akuntabel	1. Perbedaan priodesasi perencanaan jangka menengah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Kota Dumai; 2. Belum diimplementasikannya kebijakan data terpadu pembangunan secara nasional; 3. Adanya perbedaan nomenklatur program dan kegiatan dan perbedaan sistematika dokumen perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah; 4. Terbatasnya kemampuan anggaran Pemerintah Kota Dumai guna peningkatan kapasitas aparatur perencana.	1. Telah terlaksananya mekanisme fasilitasi serta pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi dan dan Pemerintah pusat; 2. Telah diimplementasikan nya penggunaan teknologi informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Kota Dumai; 3. Telah sinkronnya tahapan perencanaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Motivasi aparatur perencana dalam peningkatan kapasitas diri cukup tinggi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Rencana Sektoral Lainnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, rencana tata ruang wilayah kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan

strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Adapun kedudukan RTRW kota dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Berdasarkan Gambar 3.1. tersebut, dapat disimpulkan bahwa rencana umum RTRW kota merupakan penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kota yang sesuai dengan fungsi dan perannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. RTRW kota menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sinergitas antara dokumen RTRW dan RPJPD/RPJMD dapat mewujudkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan wilayah kota.



Gambar 3.1. Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber : Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2018

Pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai Tahun 2019-2039, penjelasannya menyatakan bahwa RTRW Kota berperan sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Lebih lanjut juga dinyatakan bahwa RTRW Kota berfungsi sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Dumai adalah mewujudkan kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri pengolahan migas dan non migas yang maju, unggul dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Di dalam Peraturan daerah RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039 juga telah ditetapkan kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis kota yang dalam upaya perwujudannya memerlukan perhatian khusus baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan.

Di dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik perencanaan tata ruang maupun rencana jangka menengah harus memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Tujuan penyusunan KLHS RPJMD adalah mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJMD melalui:

- 1) Pengkajian pengaruh rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program RPJMD terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan;
- 2) Perumusan mitigasi dampak dan/atau alternatif program serta saran penyempurnaan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta kebijakan umum RPJMD;
- 3) Pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJMD; dan
- 4) Peningkatan kapasitas perencana pembangunan daerah dalam melaksanakan KLHS. KLHS diharapkan dapat memfasilitasi dan menjadi media bersama antara pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang tertuang dalam RPJMD dapat secara aktif

mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS RPJMD mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

- 1) data dan informasi yang menjadi elemen penting yang dibutuhkan dalam KLHS tidak tersedia pada beberapa instansi pemerintah daerah sehingga sulit untuk melakukan penyusunan data dasar (*baseline data*);
- 2) RPJMD Kota Dumai secara spasial belum memberikan lokasi yang jelas.

Dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Dumai sekaligus mewujudkan pembangunan berkelanjutan terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS sebagai berikut:

1. Faktor penghambat
 - a. Kualitas aparatur perencana belum memadai;
 - b. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, lebih dari 75% wilayah Kota Dumai merupakan kawasan hutan. Hal ini memicu tingginya alih fungsi lahan di Kota Dumai;
 - c. Hasil evaluasi penataan ruang kurang berkontribusi sebagai acuan perencanaan;
 - d. Data dan informasi dasar yang valid untuk rencana pembangunan sulit didapatkan; dan
 - e. RPJMD secara spasial belum menunjukkan lokasi sasaran yang jelas.
2. Faktor pendorong
 - a. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Dumai berada di pesisir pantai bagian timur Pulau Sumatera, terlindung oleh Pulau Rupaat sehingga sangat strategis untuk berkembang menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan;

- b. Di dalam sistem perkotaan nasional pada rencana struktur ruang nasional, Dumai ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional di Provinsi Riau. Disamping itu Dumai merupakan satu-satunya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) percepatan pengembangan kota-kota utama kawasan Perbatasan di Provinsi Riau;
- c. Di dalam sistem jaringan transportasi darat nasional pada rencana struktur ruang nasional, Dumai masuk ke dalam jaringan jalan bebas hambatan antar kota di Pulau Sumatera;
- d. Di dalam sistem jaringan transportasi laut nasional pada rencana struktur ruang nasional, Pelabuhan Dumai merupakan satu-satunya pelabuhan internasional di Provinsi Riau. Pelabuhan Dumai berada pada salah satu jalur lalu lintas pelayaran niaga tersibuk di dunia “Selat Malaka”, dan memiliki *hinterland* dengan beragam potensi sumber daya alam;
- e. Di dalam sistem jaringan transportasi udara nasional pada rencana struktur ruang nasional, Bandara Pinang Kampai Dumai merupakan satu-satunya bandar udara umum dengan pusat penyebaran skala pelayanan tersier di Provinsi Riau;
- f. Pada rencana struktur ruang wilayah RTRW Provinsi Riau Tahun 2018-2038, tepatnya untuk sistem perkotaan provinsi, Kota Dumai ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

3.5. Penetapan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil nilai skala kriteria terhadap isu strategis, mengacu kepada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Bappeda, gambaran pelayanan, sasaran jangka menengah rencana strategis, implikasi RTRW dan implikasi KLHS bagi pelayanan Bappeda, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan data dasar dan data sektoral yang lengkap, valid dan aktual dalam penyusunan perencanaan pembangunan;

2. Optimalisasi kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan sinergi antar pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi Riau serta pemerintah pusat;
3. Tersedianya berbagai regulasi terkait perencanaan dan penganggaran yang dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan daerah;
4. Pemanfaatan dan peningkatan inovasi dalam perencanaan Pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kinerja SDM yang terlibat dalam setiap perencanaan pembangunan



BAPPEDA KOTA DUMAI

BerAKHLAK **#** bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Dumai pada tahun 2026 ***“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”*** sekaligus pencapaian misi keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 ***“Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik”***, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dirumuskan Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai yaitu ***“Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai”***. Untuk mengukur tercapai atau tidaknya tujuan ini maka ditetapkan indikator kinerja tujuan yaitu ***“Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda”***.

Adapun sasaran yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut, mempedomani Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 adalah :

“Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional” dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Keselarasan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN;
2. Keselarasan dokumen RRKPD Kota Dumai dengan dokumen RKP;
3. Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4. Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD;
5. Inovasi perencanaan pembangunan; dan
6. Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait.

Berkenaan dengan terjadinya perubahan struktur organisasi perangkat daerah di Pemerintah kota Dumai maka Bappeda Kota Dumai telah melakukan penyesuaian terhadap sasaran dan indikator kinerja. Adapun Kesesuaian antara Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026 tersaji pada Tabel 4.1. berikut ini

**Tabel 4.1. (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai
Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian pembangunan	Indeks Perencanaan	84	85			
			Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD	100%	100%	-	-	-
			Persentase dukungan RKPD Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100%	100%	-	-	-
			Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100%	100%	-	-	-
			Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	100%	100%	-	-	-
Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	20%	25%	-	-	-		
2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda	-	-	100	100	100
			Keselarasan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN	-	-	9	9	9
			Keselarasan dokumen RRPKD Kota Dumai dengan dokumen RKP	-	-	13	13	13

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
		dengan Propinsi Riau dan Nasional	Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD	-	-	10	10	10
			Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD;	-	-	49	49	49
			Inovasi perencanaan pembangunan	-	-	9	9	9
			Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait	-	-	10	10	10

Metode dan tata cara pengukuran untuk masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran tersebut berpedoman kepada Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan.



BAPPEDA
KOTA DUMAI

BerAKHLAK **#** bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB V
STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN

BAB V

STRATEGI DAN

ARAH KEBIJAKAN

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung pencapaian Misi keempat pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu *“Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik”*. Berkenaan dengan terjadinya perubahan struktur organisasi perangkat daerah di Pemerintah kota Dumai maka strategi yang ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian misi keempat RPJMD Kota Dumai sekaligus pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah *“Mewujudkan perencanaan pembangunan yang memiliki sinergi, berkualitas dan terhubung dengan perencanaan kinerja”*.

Adapun arah kebijakan yang dirumuskan antara lain:

1. Peningkatan sinergi perencanaan Pembangunan antara pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat;
2. Peningkatan koordinasi dan partisipasi seluruh *stackholder* pembangunan dalam penyusunan perencanaan Pembangunan guna meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan daerah; dan
3. Peningkatan dan pengembangan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian seluruh target kinerja yang ditetapkan.

Kesesuaian antara Visi dan Misi Kota Dumai dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi yang tertuang di dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 tersebut tersaji pada Tabel 5.1 berikut:

**Tabel 5.1. (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Visi : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)			
Misi : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang memiliki sinergi, berkualitas dan terhubung dengan perencanaan kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sinergi perencanaan Pembangunan antara pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat; 2. Peningkatan koordinasi dan partisipasi seluruh <i>stackholder</i> pembangunan dalam penyusunan perencanaan Pembangunan guna meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan daerah; dan 3. Peningkatan dan pengembangan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian seluruh target kinerja yang ditetapkan



BAPPEDA
KOTA DUMAI

BerAKHLAK **#** bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB VI
RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Menurut Pasal 13 Permendagri 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra perangkat daerah ini menjadi pedoman bagi Kepala Perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPJMD. Adapun pengertian dari masing-masing komponen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD;

3. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
4. Sub Kegiatan perangkat daerah adalah merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Berkenaan dengan terjadinya perubahan struktur organisasi perangkat daerah di Pemerintah kota Dumai maka, maka dilakukan penyesuaian rincian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai Tahun 2021-2026 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda Kota Dumai tersaji pada Tabel 6.1.(T-C.27) berikut:

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

Tabel 6.1. (T-C.27)
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 20212026

TUJUAN	SASARAN	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							TAHUN 2022 REALISASI		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026				
							KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET			PENDANAAN (Rp.)	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	Terwujudnya sberg perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	5 01		PERENCANAAN				9.259.113.719		12.627.049.994		17.015.000.000		17.015.000.000		17.015.000.000		72.931.163.713			
		5 01 02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD	%	100		100		100		100		100		100		6.776.437.853		
		5 01 02 2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen/ Laporan	3	401.609.155	6	1.073.500.000	4	1.175.000.000	3	1.175.000.000	5	1.175.000.000	21	5.000.109.155			
		5 01 02 2.01 0001		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPd (Sebagai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen			3	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2	100.000.000	7	400.000.000			
		5 01 02 2.01 0003		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Konsultasi Publik yang Dilaksanakan	Forum	1	4.580.000									1		289.580.000		
		5 01 02 2.01 0004		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara			2	60.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	2	75.000.000	6		380.459.500		
		5 01 02 2.01 0005		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Forum OPD yang Dilaksanakan	Forum	1	36.959.500									1				
		5 01 02 2.01 0005		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara			1	43.500.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4				
		5 01 02 2.01 0005		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang RKPd yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional	Kali	3	50.822.552									3		820.822.552		
		5 01 02 2.01 0007		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara			2	170.000.000	2	200.000.000	1	200.000.000	2	200.000.000	7				
		5 01 02 2.01 0007		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Manajemen resiko pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Dokumen	1										1				
		5 01 02 2.01 0007		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPd dan dokumen Perubahan RKPd yang disusun	Dokumen	2	309.247.103									2		3.109.247.103		
		5 01 02 2.01 0007		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPd)	Dokumen			3	700.000.000	3	700.000.000	2	700.000.000	3	700.000.000	11				
		5 01 02 2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	150.633.531	1	102.227.500	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	5		777.861.031		
		5 01 02 2.02 0001		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	1	150.633.531	1	102.227.500							2		777.861.031		
		5 01 02 2.02 0001		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen					1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	3				
		5 01 02 2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan	Dokumen/ Laporan	1	112.831.867	3	135.635.800	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	7		698.467.667		
		5 01 02 2.03 0001		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	Dokumen	1	112.831.867									1		698.467.667		
		5 01 02 2.03 0001		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan			3	135.635.800	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	6				
		5 01 02 2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen/ Laporan	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3		300.000.000		
5 01 02 2.04 0003		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pembinaan sistem infomasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen					1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3		300.000.000				
5 01 03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	%	100		100		100		100		100		100		100				
5 01 03 2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	%	100	1.332.068.192	100	1.781.192.210	100	3.285.000.000	100	3.285.000.000	100	3.285.000.000	100	3.285.000.000	100	3.285.000.000			
5 01 03 2.01 0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen/ Laporan	7	370.235.566	6	438.429.816	9	1.200.000.000	9	1.200.000.000	9	1.200.000.000	40		4.408.665.382				
5 01 03 2.01 0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	2	91.928.566									2		788.563.593				
5 01 03 2.01 0002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen			1	96.635.027	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4						
5 01 03 2.01 0002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah			4	4.200.000							4		64.200.000				
5 01 03 2.01 0002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan					1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3						

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

TUJUAN	SASARAN	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi			
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026		
							KINERJA REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)			TARGET	PENDANAAN (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		5 01 03 2.02 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah				6	40.914.100								6	394.430.500		
		5 01 03 2.02 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/ RPJMD pada Bidang SDA	Laporan						1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	835.806.318			
		5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen/ Laporan		8	654.943.442	4	769.141.094	8	1.240.000.000	8	1.240.000.000	8	1.240.000.000	36	5.144.084.536			
		5 01 03 2.03 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Dokumen		1	90.654.600									1	938.570.794			
		5 01 03 2.03 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur	Dokumen		1	8.164.700									1	108.164.700			
		5 01 03 2.03 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah				6	65.180.500							6	340.030.500			
		5 01 03 2.03 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur	Dokumen		1	322.730.564									1	1.667.817.064			
		5 01 03 2.03 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Dokumen		1	36.239.460									1	751.019.960			
		5 01 03 2.03 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Kewilayahan	Dokumen		1	8.244.700									1	108.244.700			
		5 01 03 2.03 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah				7	65.180.500							7	394.430.500			
		5 01 03 2.03 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	Dokumen		1	124.809.418									1	835.806.318			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan				1	110.996.900	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4				

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

TUJUAN	SASARAN	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi						
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026					
							KINERJA REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)			TARGET	PENDANAAN (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Meningkatnya Hasil Kelibangan dalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah		5 05 02		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelibangan yang implementatif	%		20	134.286.700	25	289.800.263													
		5 05 02 2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen		1	75.495.176		155.381.334													
		5 05 02 2.01	0012		Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	Dokumen		1	75.495.176														
		5 05 02 2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen		1	58.791.524		134.418.929													
		5 05 02 2.04	0003		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan			1	92.796.929													
		5 05 02 2.04	0004		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Laporan			1	41.622.000													
		X XX			NON URUSAN																			
		X XX 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	%		100	7.261.970.974	100	9.534.494.484	100	12.130.000.000	100	12.130.000.000	100	12.130.000.000	100	53.186.465.458				
		X XX 01 2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen/Laporan		10	13.699.900	10	13.912.400	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	50	327612.300				
		X XX 01 2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		3	2.709.900	3	2.712.800	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	15	95.422.700				
X XX 01 2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		1	2.639.600									1				50.279.200			
X XX 01 2.01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1	3.383.200	1	2.639.600	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1				66.808.900			
X XX 01 2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1	2.024.600									1				34.083.600			
X XX 01 2.01	0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		1	1.304.300									1				32.640.200			
X XX 01 2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen		2	1.495.300									2				45.058.100			
X XX 01 2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PK, RKT, dan RA	Dokumen		1	143.000									1				3.319.600			
X XX 01 2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen/Laporan		2	5.006.836.480	8	5.989.007.360	9	6.030.000.000	9	6.030.000.000	9	6.030.000.000	37	29.085.843.840						
X XX 01 2.02	0001		Fersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		14	5.005.788.580									14				28.993.748.840			
X XX 01 2.02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Dokumen		1	629.400									1				61.258.000			
X XX 01 2.02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan				1	628.600	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4				15.837.000			
X XX 01 2.02	0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Dokumen		1	418.500									1				15.000.000			
X XX 01 2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen/Laporan		1	349.500	2	349.500	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	18	30.699.000						
X XX 01 2.03	0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen				2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	6	6.000.000						
X XX 01 2.03	0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah	Laporan		1	349.500									1				9.699.000			
X XX 01 2.03	0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan				2	349.500	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	8				15.000.000			

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

TUJUAN	SASARAN	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026				
							KINERJA REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		X XX 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang		80	94.070.000	60	235.718.200	80	850.000.000	80	850.000.000	80	850.000.000	380	2.879.788.200			
		X XX 01 2.05 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit						1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000			
		X XX 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket						1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000			
		X XX 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dan NonFormal	Orang	6	50.670.000										6		1.486.388.200		
		X XX 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			60	235.718.200	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	120			
		X XX 01 2.05 0011	Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		74	43.400.000			20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	134	343.400.000			
		X XX 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		12	623.283.674	12	748.281.774	12	1.340.000.000	12	1.340.000.000	12	1.340.000.000	60	5.391.565.448			
		X XX 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan Paket		12 10.872.900										12	81.849.572			
		X XX 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan Paket		12 181.648.594										12	1.097.461.094			
		X XX 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bulan Paket		12 14.364.800										12	98.015.800			
		X XX 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan Paket		12 87.780.600										12	648.180.000			
		X XX 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan Paket		12 47.543.400										12	240.177.600			
		X XX 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bulan Dokumen		12 28.380.000										12	208.060.000			
		X XX 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan Laporan		12 252.693.380										12	3.017.821.382			
		X XX 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		37	195.830.000	44	860.731.500	14	1.650.000.000	14	1.650.000.000	14	1.650.000.000	123	6.006.561.500			
		X XX 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit						1	125.208.000	0	0	0	0	1	125.208.000			
		X XX 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit						1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	3	1.200.000.000			
		X XX 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		24	60.000.000	1	95.500.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	28	755.500.000			
		X XX 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		13	135.830.000	42	640.023.500	10	700.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	85	2.875.853.500			
		X XX 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit						1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000			
		X XX 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit						1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000			
		X XX 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		12	829.404.460	12	946.698.500	12	1.250.000.000	12	1.250.000.000	12	1.250.000.000	60	5.526.102.960			
		X XX 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan Laporan		12 2.340.000										12	37.680.000			
		X XX 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan Laporan		12 12.487.100										12	154.277.100			
		X XX 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan						1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000			
		X XX 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran, keamanan kantor, kebersihan kantor, dan tenaga surip Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan Laporan		12 814.577.360										12	5.184.145.860			

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

TUJUAN	SASARAN	Kode			URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
									TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026			
									KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)			TARGET	PENDANAAN (Rp.)		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit		65	498.496.960	151	739.795.250	47	900.000.000	47	900.000.000	47	900.000.000	357	3.938.292.210			
		X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	38.528.515									1	227.058.515			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			1	38.530.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4					
		X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/ berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Unit	20	193.224.445									20	1.559.354.445			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	Unit			20	316.130.000	20	350.000.000	20	350.000.000	20	350.000.000	80					
		X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	Unit	42	39.679.000	104								146	404.814.250			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			24	65.135.250	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	96					
		X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	84.930.000	1	120.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	804.930.000			
		X	XX	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	142.135.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	942.135.000			
							PAGU TOTAL					9.393.400.419		12.916.850.257		17.015.000.000		17.015.000.000		17.015.000.000		72.931.163.713		



BAPPEDA
KOTA DUMAI

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB VII
KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 serta mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan seperti yang tersaji pada Tabel 7.1 (T-C.28) berikut merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 dan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017. Serta mempedomani Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.

Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Dumai pada perubahan Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 ini merevisi sebagian indikator yang terdapat pada Renstra Bappedalitbang Tahun 2021-2026.

**Tabel 7.1. (T-C.28)
Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai
Tahun 2021-2026 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Perencanaan		84	85			
2.	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD		100%	100%			
3.	Persentase dukungan RKPD Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi		100%	100%			
4.	Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan		100%	100%			
5.	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.		100%	100%			
6	Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif		20%	25%			
7.	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda				100	100	100
8.	Keselarasan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN				9	9	9
9.	Keselarasan dokumen RRPKD Kota Dumai dengan dokumen RKP				13	13	13
10.	Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD				10	10	10
11.	Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD;				49	49	49
12.	Inovasi perencanaan pembangunan				9	9	9
13.	Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait				10	10	10

Metode dan tata cara penukuran untuk masing-masing indikator kinerja tersebut berpedoman kepada Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Prencanaan Pembangunan. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kerangka kerja dari penilaian IPPN untuk Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tabel 7.2. berikut ini.

Tabel 7.2.
Kerangka Kerja Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) untuk Pemerintah Daerah

No.	Komponen	Sub-Komponen	Dokumen yang Dinilai
1	2	3	4
1.	Sinergi	Keselarasn dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN	RPJMD
		Keselarasn dokumen RKPD dengan RKP	
		Kesesuaian anggaran daerah dalam kontribusinya terhadap PN di daerah	
2.	Kualitas Perencanaan	Kesesuaian prioritas daerah dengan isu daerah	RKPD
		Kesesuaian target dan sasaran dalam menyelesaikan prioritas daerah dan isu daerah	
		Kesesuaian Program/ Kegiatan/Proyek untuk mencapai target dan sasaran	
		Inovasi perencanaan pembangunan	
3.	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	Target dan sasaran Pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait	RKPD – Renstra OPD

Sumber : Laporan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023

- b. Instrumen pengukuran kualitas kebijakan untuk Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut (Tabel 7.3):

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.3.

Instrumen Pengukuran Kualitas Kebijakan untuk Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Daerah

NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR	OPSI	PENILAIAN	BOBOT
1. SINERGI mengukur kerjasama antar unit pemerintahan, yaitu pemerintah dan daerah untuk saling mengisi dan melengkapi dalam upaya bersama membangun sebuah rencana agar pelaksanaan pelayanan dasar dapat mewujudkan tujuan bersama			32
a. Keselarasan dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN; Pengukuran kesesuaian substansi dalam dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN			9
1) Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Dumai dengan sasaran prioritas nasional (PN) RPJMN			2
a) Tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RPJMD dengan PN RPJMN	A. Tidak ada keterkaitan B. Kurang dari 50% sesuai dengan PN RPJMN C. Diatas atau sama dengan 50% sesuai dengan PN RPJMN	A = 0 B = 0,3 C = 0,5	0,5
b) Ketersediaan tabel persandingan antara Sasaran Pembangunan daerah (RPJMD) dengan PN RPJMN	A. Tidak ada B. Ada	A = 0 B = 0,5	0,5
c) Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dengan PN RPJMN	A. Tidak ada keterkaitan B. Kurang dari 50% sesuai dengan PN RPJMN C. Diatas atau sama dengan 50% sesuai dengan PN RPJMN	A = 0 B = 0,3 C = 0,5	0,5
d) Tersedianya tabel persandingan antara PN RPJMN dengan Prioritas Pembangunan Daerah	A. Tidak ada B. Ada	A = 0 B = 0,5	0,5
2) Tersedianya dukungan program daerah dalam RPJMD Kota Dumai untuk mendukung Kegiatan Prioritas dalam RPJMN			3
a) Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 1 (Penguatan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas) RPJMN sesuai kewenangan daerah	A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN	A = 0,086 B = 0,172 C = 0,258	0,43

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR	OPSI	PENILAIAN	BOBOT
	D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN	D = 0,344 E = 0,43	
b) Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 2 (Pengembangan dan Pemerataan Wilayah) RPJMN sesuai kewenangan daerah	A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN	A = 0,086 B = 0,172 C = 0,258 D = 0,344 E = 0,43	0,43
c) Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 3 (Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing) RPJMN sesuai kewenangan daerah	A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN	A = 0,086 B = 0,172 C = 0,258 D = 0,344 E = 0,43	0,43

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR	OPSI	PENILAIAN	BOBOT
d) Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 4 (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan) RPJMN sesuai kewenangan daerah	A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN	A = 0,086 B = 0,172 C = 0,258 D = 0,344 E = 0,43	0,43
e) Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 5 (Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar) RPJMN sesuai kewenangan daerah	A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN	A = 0,086 B = 0,172 C = 0,258 D = 0,344 E = 0,43	0,43
f) Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung Kegiatan Prioritas dalam	A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN	A = 0,086	0,43

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR	OPSI	PENILAIAN	BOBOT
PN 6 (Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim) RPJMN sesuai kewenangan daerah	B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN	B = 0,172 C = 0,258 D = 0,344 E = 0,43	
g) Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 7 (Memperkuat Stabilitas Polhukhankamdan Transformasi Pelayanan Publik) sesuai kewenangan daerah	A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN	A = 0,086 B = 0,172 C = 0,258 D = 0,344 E = 0,43	0,43
3) Indikator makro pada RPJMD selaras dengan indikator makro pada RPJMN			1
a) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	A. Tidak selaras B. Selaras	A = 0,25 B = 0,50	0,5
b) Tingkat Kemiskinan (%)	A. Tidak selaras B. Selaras	A = 0,25 B = 0,50	0,5
4) Dokumen RPJMD Kota Dumai selaras dengan Proyek Prioritas Strategis	A. Tidak B. Ya	A = 0,5 B = 1	1

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR	OPSI	PENILAIAN	BOBOT
5) Komponen SPM di RPJMD Kota Dumai diselaraskan dengan komponen SPM Nasional	A. Tidak B. Ya	A = 0,5 B = 1	1
6) Target SPM daerah diselaraskan dengan target SPM nasional	A. Tidak B. Ya	A = 0,5 B = 1	1
b. Keselarasan dokumen RKPD dengan dokumen dan RKP; Pengukuran kesesuaian substansi dalam dokumen RKPD dengan dokumen RKP			13
1) Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan sasaran prioritas nasional (PN) RKP			2,50
a) Tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah pada RKPD dengan PN RKP	A. Tidak ada keterkaitan B. Kurang dari 50% sasaran pembangunan daerah sesuai dengan sasaran PN RKP C. Diatas 50% sasaran pembangunan daerah sesuai dengan sasaran PN RKP	A = 0,1 B = 0,31 C = 0,625	0,625
b) Tersedianya tabel persandingan antara Sasaran Pembangunan Daerah pada RKPD dengan PN RKP	A. Tidak ada B. Ada	A = 0 B = 0,625	0,625
c) Tingkat keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD dengan PN RKP	A. Tidak ada keselarasan B. Kurang dari 50% prioritas program RKPD selaras dengan PN RKP C. Diatas 50% prioritas program RKPD selaras PN RKP	A = 0,1 B = 0,31 C = 0,625	0,625
d) Tersedianya tabel persandingan antara PN RKP dengan Prioritas Pembangunan Daerah	A. Tidak ada B. Ada	A = 0 B = 0,625	0,625
2) Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada seluruh PN1: Penguatan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas pada RKP			1,50
a) Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 1 sesuai dengan kewenangan daerah	A. =<25% B. 25% - 50% C. 50% - 75% D. =>75%	A = 0,1875 B = 0,375 C = 0,5625 D = 0,75	0,75
b) Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program	A. Tidak ada B. Ada dan sesuai	A = 0 B = 0,75	0,75

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR	OPSI	PENILAIAN	BOBOT
prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah			
3) Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada seluruh PN2: Pengembangan dan pemerataan wilayah pada RKP			1,50
a) Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 2 sesuai dengan kewenangan daerah	A. =<25% B. 25% - 50% C. 50% - 75% D. =>75%	A = 0,1875 B = 0,375 C = 0,5625 D = 0,75	0,75
b) Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	A. Tidak ada B. Ada dan sesuai	A = 0 B = 0,75	0,75
4) Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada seluruh PN3: Peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing pada RKP			1,50
a) Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 3 sesuai dengan kewenangan daerah	A. =<25% B. 25% - 50% C. 50% - 75% D. =>75%	A = 0,1875 B = 0,375 C = 0,5625 D = 0,75	0,75
b) Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	A. Tidak ada B. Ada dan sesuai	A = 0 B = 0,75	0,75
5) Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada seluruh PN4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan pada RKP			1,50
a) Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 4 sesuai dengan kewenangan daerah	A. =<25% B. 25% - 50% C. 50% - 75% D. =>75%	A = 0,1875 B = 0,375 C = 0,5625 D = 0,75	0,75
b) Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	A. Tidak ada B. Ada dan sesuai	A = 0 B = 0,75	0,75

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR	OPSI	PENILAIAN	BOBOT
6) Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada seluruh PN5: Penguatan infrastruktur dan pelayanan dasar pada RKP			1,50
a) Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 5 sesuai dengan kewenangan daerah	A. =<25% B. 25% - 50% C. 50% - 75% D. =>75%	A = 0,1875 B = 0,375 C = 0,5625 D = 0,75	0,75
b) Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	A. Tidak ada B. Ada dan sesuai	A = 0 B =0,75	0,75
7) Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada seluruh PN6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim pada RKP			1,50
a) Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN 6 sesuai dengan kewenangan daerah	A. =<25% B. 25% - 50% C. 50% - 75% D. =>75%	A = 0,1875 B = 0,375 C = 0,5625 D = 0,75	0,75
b) Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	A. Tidak ada B. Ada dan sesuai	A = 0 B =0,75	0,75
8) Indikator makro pada RKPD selaras dengan indikator makro pada RKP			1,50
a) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	A. Tidak selaras B. Selaras	A = 0,375 B = 0,75	0,75
b) Tingkat Kemiskinan (%)	A. Tidak selaras B. Selaras	A = 0,375 B = 0,75	0,75
c. Kesesuaian APBD Kota Dumai untuk membiayai program prioritas Nasional dalam dokumen RKPD			10
1) Tersedianya dukungan APBD untuk Program Prioritas Nasional/Major Project dalam Dokumen RKPD	A. Tidak Tersedia B. Tersedia	A = 0 B = 10	10
2. KUALITAS PERENCANAAN indikator untuk mengukur kualitas perencanaan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara isu strategis target - Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD, dari tingkat inovasi dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah			58

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR	OPSI	PENILAIAN	BOBOT
a. Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan di RPJMD Kota Dumai atau RKPD Kota Dumai; Mengukur kesesuaian antara isu strategis – target – Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD			49
1) Kesuaian isu strategis dengan kebutuhan daerah			18
a) Keterkaitan permasalahan daerah (kebutuhan daerah) dengan hasil evaluasi	A. Penyusunan kebutuhan daerah sama dengan atau kurang dari 25% hasil evaluasi B. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% hasil evaluasi C. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% hasil evaluasi D. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% hasil evaluasi E. Penyusunan kebutuhan daerah 100% berdasarkan hasil evaluasi	A = 1,2 B = 2,4 C = 3,6 D = 4,8 E = 6,0	6
b) Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan pembangunan	A. Kesesuaian sama dengan atau kurang dari 25% B. Kesesuaian lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% C. Kesesuaian lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% D. Kesesuaian lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% E. Kesesuaian 100%	A = 1,2 B = 2,4 C = 3,6 D = 4,8 E = 6,0	6
c) Penyusunan prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis	A. Penyusunan prioritas sama dengan atau kurang dari 25% isu strategis yang telah diidentifikasi B. Penyusunan prioritas lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% isu strategis yang telah diidentifikasi C. Penyusunan prioritas lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% isu strategis yang telah diidentifikasi D. Penyusunan lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% isu strategis yang telah diidentifikasi E. Penyusunan 100% berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi	A = 1,2 B = 2,4 C = 3,6 D = 4,8 E = 6,0	6

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR	OPSI	PENILAIAN	BOBOT
2) Kesesuaian Target dan Sasaran Pembangunan dalam menyelesaikan Isu dan Prioritas Daerah			14
a) Tersedianya indikator sasaran untuk isu strategis/prioritas pembangunan daerah	A. Tidak ada B. Ada	A = 0 B = 6	6
b) Tingkat kesesuaian indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dalam menyelesaikan isu strategis daerah/prioritas pembangunan daerah	A. =<25% B. 25% - 50% C. 50% - 75% D. =>75%	A = 2 B = 4 C = 6 D = 8	8
3) Kesesuaian Program/Kegiatan/Proyek dalam mencapai target dan sasaran program			17
a) Prioritas Pembangunan Daerah dijabarkan menjadi Program Prioritas	A. =<25% B. 25% - 50% C. 50% - 75% D. =>75%	A = 2,125 B = 4,25 C = 6,375 D = 8,5	8,5
b) Tingkat keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dengan indikator kinerja program prioritas	A. =<25% B. 25% - 50% C. 50% - 75% D. =>75%	A = 2,125 B = 4,25 C = 6,375 D = 8,5	8,5
b. Inovasi Perencanaan Pembangunan; Mengukur tingkat inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan pembangunan			9
1) Keterkaitan permasalahan dengan inovasi yang dilaksanakan	A. Lemah B. Kuat	A = 1 B = 3	3
2) Keterkaitan <i>output</i> dengan <i>outcome</i> inovasi	A. Lemah B. Kuat	A = 1 B = 3	3
3) Proporsi jumlah proyek inovasi di dalam perencanaan pembangunan daerah terhadap perencanaan proyek reguler	A. 0% B. 0,1% - 2% C. 2% - 4,9% D. =>5%	A = 1 B = 1,2 C = 2 D = 3	3
3. KETERHUBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN PERENCANAAN KINERJA Mengukur keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja dilihat dari target dan sasaran Pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja Lembaga terkait			10
a. Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait; Mengukur target dan sasaran Pembangunan daerah yang menjadi target dan sasaran kinerja OPD terkait			10

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR	OPSI	PENILAIAN	BOBOT
1) Cascading Target Pembangunan Daerah menjadi Target Kinerja OPD terkait didalam Pemerintah Daerah			10
a) Tersedianya penanggungjawab OPD untuk masing-masing program prioritas	A. Tidak ada B. Ada sebagian C. Tercascade seluruhnya	A = 0 B = 2 C = 5	5
b) Target dan sasaran prioritas daerah menjadi IKU OPD yang bertanggungjawab	A. Tidak ada B. Ada sebagian C. Tercascade seluruhnya	A = 0 B = 2 C = 5	5

Sumber : Lapiran Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023



BAPPEDA KOTA DUMAI

BerAKHLAK **#** bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaborasi

BAB VIII PENUTUP



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 2021-2026. Dokumen ini menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja serta program/kegiatan Bappeda selama 5 (lima) tahun dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi keempat Kota Dumai Tahun 2026. Renstra ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan Renstra Bappeda ini juga merupakan penerjemahaan Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024.

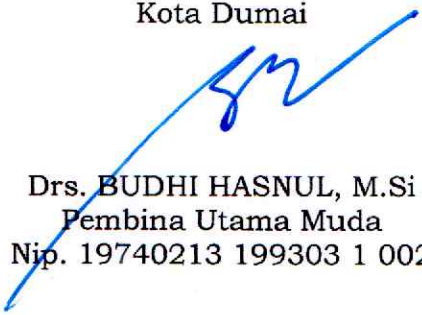
Tata cara penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota Dumai ini sama dengan tata cara penyusunan dokumen Renstra seperti yang telah dijelaskan secara rinci pada Bab II dokumen ini. Pendanaan program dan kegiatan di dalam dokumen rencana ini bersifat indikatif, untuk tahun 2024-2026, sedangkan pagu untuk 2022 merupakan realisasi

anggaran pada tahun tersebut dan pagu pada tahun 2023 adalah pagu berdasarkan pada penetapan Perubahan APBD Kota Dumai Tahun 2023.

Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan acuan oleh Kepala Bappeda dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) sampai dengan tahun 2026.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra Bappeda Kota Dumai ini akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang melingkupinya. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kerja sama yang baik dengan seluruh stakeholders pembangunan yang ada, baik di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Provinsi Riau maupun Perintaha Pusat, Lembaga legislatif Pemerintah Kota Dumai, Perangkat Daerah yang lain di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, organisasi masyarakat, Lembaga penelitian dan perguruan tinggi, maupun semua pihak yang dapat membantu kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana diinginkan.

Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Dumai

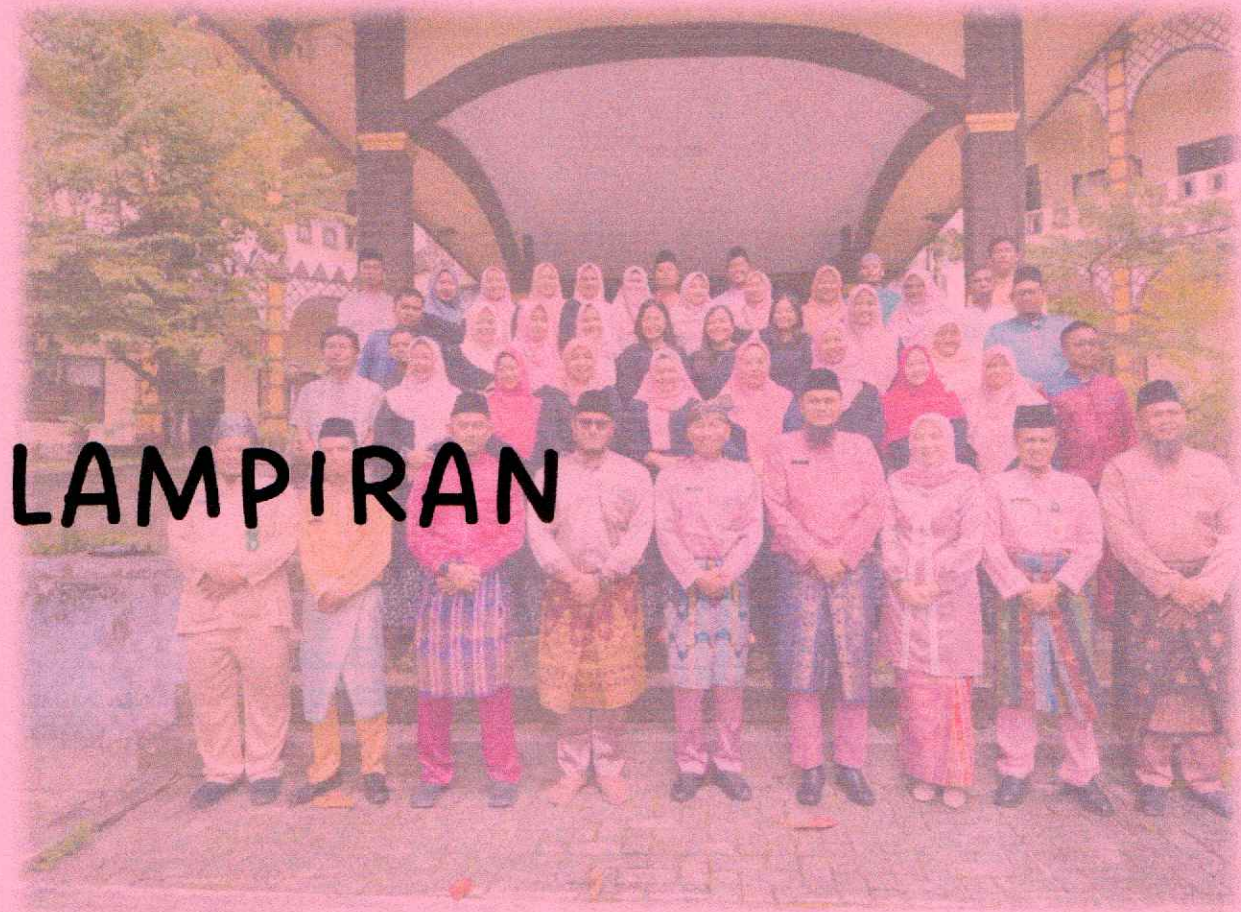


Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19740213 199303 1 002



BAPPEDA KOTA DUMAI

BerAKHLAK **#** bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**Tabel 6.1. (T-C.27.)
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026**

TUJUAN	SASARAN	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026			
							REALISASI		TARGET	PENDANAAN (RP.)	TARGET	PENDANAAN (RP.)	TARGET	PENDANAAN (RP.)	TARGET	PENDANAAN (RP.)			TARGET	PENDANAAN (RP.)	TARGET	PENDANAAN (RP.)
							KINERJA	ANGGARAN (RP.)														
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	5 01	PERENCANAAN					9.259.113.719		12.627.049.994		17.015.000.000		17.015.000.000		17.015.000.000		72.931.163.713				
		5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD	%	100		100		100		100		100		100		100	6.776.437.853			
		5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen/Laporan	3	401.609.155	6	1.073.500.000	4	1.175.000.000	3	1.175.000.000	5	1.175.000.000	21	5.000.109.155					
		5 01 02 2.01 0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPd (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen			3	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2	100.000.000	7	400.000.000					
		5 01 02 2.01 0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Konsultasi Publik yang Dilaksanakan	Forum	1	4.580.000									1	289.580.000					
		5 01 02 2.01 0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Forum OPD yang Dilaksanakan	Forum	1	36.959.500									1	380.459.500					
		5 01 02 2.01 0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang RKPd yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional	Kali	3	50.822.552									3	820.822.552					
		5 01 02 2.01 0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Manajemen resiko pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Dokumen	1	309.247.103									1	3.109.247.103					
				Jumlah dokumen RKPd dan dokumen Perubahan RKPd yang disusun	Dokumen	2										2						
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPd)	Dokumen	3	700.000.000	3	700.000.000	2	700.000.000	3	700.000.000	11								
		5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	150.633.531	1	102.227.500	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	5	777.861.031					
		5 01 02 2.02 0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	1	150.633.531	1	102.227.500							2	777.861.031					
				Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen			1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	3								
		5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan Daerah	Dokumen/Laporan	1	112.831.867	3	135.635.800	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	7	698.467.667					
		5 01 02 2.03 0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	Dokumen	1	112.831.867									1	698.467.667					
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan			3	135.635.800	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	6						
		5 01 02 2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen/Laporan	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000					
		5 01 02 2.04 0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pembinaan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen					1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000					
		5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	%	100		100		100		100		100		100		100		12.968.260.402		
		5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	%	100	1.332.068.192	100	1.781.192.210	100	3.285.000.000	100	3.285.000.000	100	3.285.000.000	100	3.285.000.000	100				
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen/Laporan	7	370.235.566	6	438.429.816	9	1.200.000.000	9	1.200.000.000	9	1.200.000.000	40	4.408.665.382							
5 01 03 2.01 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	2	91.928.566									2	788.563.593							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen			1	96.635.027	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4								

TUJUAN	SASARAN	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026			
							REALISASI		TARGET	PENDANAAN (RP.)	TARGET	PENDANAAN (RP.)	TARGET	PENDANAAN (RP.)	TARGET	PENDANAAN (RP.)			TARGET	PENDANAAN (RP.)	TARGET	PENDANAAN (RP.)
							KINERJA	ANGGARAN (RP.)														
		5 01 03 2.01 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah			4	4.200.000							4	64.200.000					
		5 01 03 2.01 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan					1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	201.922.600					
		5 01 03 2.01 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan	Dokumen	2	105.321.000									2						
		5 01 03 2.01 0005	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan			1	6.601.600	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4						
		5 01 03 2.01 0006	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan			1	44.363.224	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	7	944.363.224					
		5 01 03 2.01 0007	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen			1	75.411.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	4	825.411.000					
		5 01 03 2.01 0008	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah			10	10.968.000							10	100.968.000					
		5 01 03 2.01 0009	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan					1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3						
		5 01 03 2.01 0010	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	1	77.907.500									1						
		5 01 03 2.01 0011	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah			10	69.419.765							10	507.327.265					
		5 01 03 2.01 0012	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan					1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	3						
		5 01 03 2.01 0013	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	2	95.078.500									2	975.909.700					
		5 01 03 2.01 0014	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan			2	130.831.200	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	5						
		5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Dokumen/ Laporan			4	306.889.184	4	573.621.300	8	845.000.000	8	845.000.000	8	845.000.000	32	3.415.510.484			
		5 01 03 2.02 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	160.176.784									1	1.072.215.718					
		5 01 03 2.02 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen			1	162.038.934	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	4						
		5 01 03 2.02 0003	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah			8	16.773.089							8	76.773.089					
		5 01 03 2.02 0004	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan					1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3						
		5 01 03 2.02 0005	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Perekonomian	Dokumen	1	37.010.000									1						
		5 01 03 2.02 0006	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah			4	38.485.300							4	255.495.300					
		5 01 03 2.02 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan					1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3						

TUJUAN	SASARAN	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026			
							REALISASI		TARGET	PENDANAAN (RP.)	TARGET	PENDANAAN (RP.)	TARGET	PENDANAAN (RP.)	TARGET	PENDANAAN (RP.)			TARGET	PENDANAAN (RP.)	TARGET	PENDANAAN (RP.)
							KINERJA	ANGGARAN (RP.)														
		5 01 03 2.02 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian	Dokumen		2	109.702.400									2	809.016.500				
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan				2	249.314.100	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5					
		5 01 03 2.02 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen				1	60.514.100	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	510.514.100,00				
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah				2	5.581.677							2					
		5 01 03 2.02 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan						1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	65.581.677				
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah				6	40.914.100							6					
		5 01 03 2.02 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan						1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	220.914.100				
		5 01 03 2.02 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan						1	135.000.000	1	135.000.000	1	135.000.000	3	405.000.000				
		5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen/Laporan		8	654.943.442	4	769.141.094	8	1.240.000.000	8	1.240.000.000	8	1.240.000.000	36	5.144.084.536				
				Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		1	90.654.600									1					
		5 01 03 2.03 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen				1	97.916.194	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	4	938.570.794				
				Jumlah Dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur	Dokumen		1	8.164.700									1					
		5 01 03 2.03 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah				6	10.000.000							6	108.164.700				
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan						1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3					
				Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur	Dokumen		1	34.850.000									1					
		5 01 03 2.03 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah				6	65.180.500							6	340.030.500				
				Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan						1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	3					
				Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur	Dokumen		1	322.730.564									1					
		5 01 03 2.03 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan				1	295.086.500	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	4	1.667.817.064				
				Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		1	36.239.460									1					
		5 01 03 2.03 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen				1	114.780.500	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	751.019.960				

TUJUAN	SASARAN	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026			
							REALISASI		TARGET	PENDANAAN (RP.)	TARGET	PENDANAAN (RP.)	TARGET	PENDANAAN (RP.)	TARGET	PENDANAAN (RP.)			TARGET	PENDANAAN (RP.)	TARGET	PENDANAAN (RP.)
							KINERJA	ANGGARAN (RP.)														
		X XX 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dokumen		2	1.495.300									2	45.058.100				
		X XX 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan				2	1.562.800	2	14.000.000	2	14.000.000	2	14.000.000	8	3.319.600				
		X XX 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen/ Laporan		2	5.006.836.480	8	5.989.007.360	9	6.030.000.000	9	6.030.000.000	9	6.030.000.000	37	29.085.843.840				
		X XX 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		14	5.005.788.580									14	28.993.748.840				
		X XX 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang				40	5.987.960.260		6.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000	40	61.258.000				
		X XX 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Dokumen		1	629.400									1	15.837.000				
		X XX 01 2.02 0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan				1	628.600	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4	15.837.000				
		X XX 01 2.02 0009	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Dokumen		1	418.500									1	15.000.000				
		X XX 01 2.02 0010	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan				7	418.500	7	5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000	28	15.000.000				
		X XX 01 2.02 0011	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen						1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	30.699.000				
		X XX 01 2.03 0001	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen/L aporan		1	349.500	2	349.500	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	18	30.699.000				
		X XX 01 2.03 0002	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen						2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	6	6.000.000				
		X XX 01 2.03 0003	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah	Laporan		1	349.500									1	9.699.000				
		X XX 01 2.03 0004	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan				2	349.500	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	8	15.000.000				
		X XX 01 2.03 0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan						1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000				
		X XX 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang		80	94.070.000	60	235.718.200	80	850.000.000	80	850.000.000	80	850.000.000	380	2.879.788.200				
		X XX 01 2.05 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal	Unit						1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000				
		X XX 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket						1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000				
		X XX 01 2.05 0003	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal	Orang		6	50.670.000									6	1.486.388.200				
		X XX 01 2.05 0004	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang				60	235.718.200	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	120	1.486.388.200				
		X XX 01 2.05 0005	Sosisalisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang						40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	120	300.000.000				
		X XX 01 2.05 0006	Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang		74	43.400.000			20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	134	343.400.000				
		X XX 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		12	623.283.674	12	748.281.774	12	1.340.000.000	12	1.340.000.000	12	1.340.000.000	60	5.391.565.448				
		X XX 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	Bulan		12	10.872.900									12	81.849.572				
		X XX 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket				2	10.976.672	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	8	81.849.572				
		X XX 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	Bulan		12	181.648.594									12	1.097.461.094				
		X XX 01 2.06 0004	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket				1	165.812.500	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	4	1.097.461.094				
		X XX 01 2.06 0005	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor	Bulan		12	14.364.800									12	98.015.800				
		X XX 01 2.06 0006	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket				1	23.651.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4	98.015.800				
		X XX 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	Bulan		12	87.780.600									12	648.180.000				
		X XX 01 2.06 0008	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket				1	110.399.400	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	648.180.000				

TUJUAN	SASARAN	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026			
							REALISASI		TARGET	PENDANAAN (RP.)	TARGET	PENDANAAN (RP.)	TARGET	PENDANAAN (RP.)	TARGET	PENDANAAN (RP.)			TARGET	PENDANAAN (RP.)	TARGET	PENDANAAN (RP.)
							KINERJA	ANGGARAN (RP.)														
		X XX 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan		12	47.543.400									12	240.177.600				
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket				1	42.634.200	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4					
		X XX 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan		12	28.380.000									12	208.060.000				
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen				1	29.680.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4					
		X XX 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan		12	252.693.380									12	3.017.821.382				
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				1	365.128.002	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	4					
		X XX 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		37	195.830.000	44	860.731.500	14	1.650.000.000	14	1.650.000.000	14	1.650.000.000	123	6.006.561.500				
		X XX 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit				1	125.208.000	0	-	0	-	0	-	1	125.208.000				
		X XX 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit						1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	3	1.200.000.000				
		X XX 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		24	60.000.000	1	95.500.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	28	755.500.000				
		X XX 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		13	135.830.000	42	640.023.500	10	700.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	85	2.875.853.500				
		X XX 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit						1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000				
		X XX 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit						1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000				
		X XX 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		12	829.404.460	12	946.698.500	12	1.250.000.000	12	1.250.000.000	12	1.250.000.000	60	5.526.102.960				
		X XX 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	Bulan		12	2.340.000									12	37.680.000				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan				1	5.340.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4					
		X XX 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan		12	12.487.100									12	154.277.100				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan				1	21.790.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	4					
		X XX 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan						1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000				
		X XX 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran, keamanan kantor, kebersihan kantor, dan tenaga supir	Bulan		12	814.577.360									12	5.184.145.860				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan				1	919.568.500	1	1.150.000.000	1	1.150.000.000	1	1.150.000.000	4					
		X XX 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit		65	498.496.960	151	739.795.250	47	900.000.000	47	900.000.000	47	900.000.000	357	3.938.292.210				
		X XX 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan	Unit		1	38.528.515									1	227.058.515				
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit				1	38.530.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4					
		X XX 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Unit		20	193.224.445									20	1.559.354.445				
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit				20	316.130.000	20	350.000.000	20	350.000.000	20	350.000.000	80					
		X XX 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	Unit		42	39.679.000	104								146	404.814.250				
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit				24	65.135.250	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	96					
		X XX 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	84.930.000	1	120.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	804.930.000				
		X XX 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	142.135.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	942.135.000				
			PAGU TOTAL					9.393.400.419		12.916.850.257		17.015.000.000		17.015.000.000		17.015.000.000		72.931.163.713				

MISI IV : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

TUJUAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

Meningkatkan Reformasi Birokrasi								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	CC	B	B	B	B	B

TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda	Indeks			100	100	100	100	100

SASARAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

Sasaran 4.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah									
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Indeks	B	B	B	B	B	B	B	B
Indeks Manajemen Risiko	Indeks	2	2	3	3	3	3	3	3

SASARAN PERANGKAT DAERAH

Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional									
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Keselarsan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN	Bobot			9	9	9	9	9	9
Keselarsan dokumen RRPJMD Kota Dumai dengan dokumen RRP	Bobot			13	13	13	13	13	13
Keseuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD	Bobot			10	10	10	10	10	10
Keseuaian antara IIS Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD	Bobot			49	49	49	49	49	49
Inovasi perencanaan pembangunan	Bobot			9	9	9	9	9	9
Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait	Bobot			10	10	10	10	10	10

PROGRAM STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

I. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									
Sasaran : Tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan memiliki sinergi dengan pembangunan nasional									
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Presentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	%		100	100	100	100	100	100	100
Presentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan Sesuai dengan Peraturan Perundangan	%		100	100	100	100	100	100	100

KEGIATAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

I.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								
Sasaran : Terlaksananya perencanaan dan pendanaan yang kredibel dan akuntabel								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen		3	6	4	3	5	21

SUB-KEGIATAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

I.1.1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan IIS Strategis Pembangunan Daerah									
Kebijakan : Terevisi analisis kondisi daerah, permasalahan, dan IIS strategis pembangunan daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD									
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD (Sesuai Kebijakan, IIS RPJMD) Maka Rancangan Teknokratik	Dokumen		0	3	1	1	2	7	

I.1.2. Pelaksanaan Konsultasi Publik									
Kebijakan : Terlaksananya Konsultasi Publik									
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Konsultasi Publik yang Dilaksanakan	Forum		1					1	
Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara			2	1	1	2	6	

I.1.3. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah									
Kebijakan : Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah									
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Forum OPD yang Dilaksanakan	Forum		1					1	
Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara			1	1	1	1	4	

I.1.4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									
Kebijakan : Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota									
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keterlaksanaan Pro dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, ketepatan Musrenbang tingkat Nasional	Kali		3						
Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara			2	2	1	2	7	

I.1.5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
Kebijakan : Ditetapkannya dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota									
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah dokumen Manajemen Risiko Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Jumlah dokumen RKPD dan Perubahan RKPD yang disusun	Dokumen		3						
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMMD/RKPD)	Dokumen			3	3	2	3	11	

I.2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									
Sasaran : Terevisi data dukung rencana pembangunan daerah									
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	5	

I.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									
Sasaran : Terevisi laporan hasil pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang urusan perencanaan									
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan	Dokumen		1	3	1	1	1	7	

I.4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah									
Sasaran : Terevisi laporan pelaksanaan									
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen		0	0	1	1	1	3	

III.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia									
Sasaran : Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia									
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen/ Laporan		7	6	9	9	9	40	

II. PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
Sasaran : Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional, serta memiliki keterhubungan dengan perencanaan kinerja									
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Presentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	%		100	100	100	100	100	100	
Presentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	%		100	100	100	100	100	100	

I.2.1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
Kebijakan : Terevisi analisis kondisi daerah, permasalahan, dan IIS strategis pembangunan daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD									
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Matriks Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Matriks		1	1				2	
Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen				1	1	1	3	

I.2.1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota									
Kebijakan : Terevisi analisis kondisi daerah, permasalahan, dan IIS strategis pembangunan daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD									
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah dokumen hasil pembinaan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0	1	1	1	3	

I.4.1. Terlaksananya pembinaan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
Kebijakan : Terevisi analisis kondisi daerah, permasalahan, dan IIS strategis pembangunan daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD									
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan	Laporan		0					0	
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan			1	2	2	2	7	

II.1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)									
Kebijakan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		2					6	
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen			1	1	1	1	0	

II.1.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
Kebijakan : Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan									
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		0	4				4	
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan			1	1	1	1	3	

II.1.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
Kebijakan : Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan									
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan	Dokumen		2					2	
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan			1	1	1	1	4	

II.1.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan									
Kebijakan : Sinkronnya Rencana/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Pemerintahan									
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan		0	1	2	2	2	7	

II.1.5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)									
Kebijakan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		2					6	

INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	AWAL						Kinerja pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		0	1	1	1	1	4

II.1.6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Keluaran : Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia

INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah		0	10				10
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan				1	1	1	3

II.1.7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia

INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia	Dokumen		1					1
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah		10					10
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan				1	1	1	3

II.1.8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Keluaran : Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pembangunan Manusia

INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	Dokumen		2					2
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan			2	1	1	1	5

II.2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

Keluaran : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		1					1
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen			1	1	1	1	4

II.2.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan

Keluaran : Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perencanaan

INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan	Perangkat Daerah		0	8				8
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan				1	1	1	3

II.2.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan

Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perencanaan

INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Perencanaan	Dokumen		1					1
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan	Perangkat Daerah			4				4
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Laporan				1	1	1	3

II.2.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan

Keluaran : Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang perencanaan

INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perencanaan	Dokumen		2					2
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Perencanaan	Laporan			2	1	1	1	5

II.2.5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA) (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

Keluaran : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA) (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		0	1	1	1	1	4

II.2.6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)

Keluaran : Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Sumber Daya Alam (SDA)

INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah		0	2				2
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan				1	1	1	3

II.2.7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)

Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Sumber Daya Alam (SDA)

INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah		0	6				6
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan				1	1	1	3

II.2.8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)

Keluaran : Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Sumber Daya Alam (SDA)

INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang SDA	Laporan		0	0	1	1	1	3

II.3.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

Keluaran : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		0					0
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen			151	47	47	47	292

II.3.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

II.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam (SDA)

Sasaran : Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam (SDA)

INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA	Dokumen		4	4	8	8	8	32

II.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Sasaran : Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan

INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah dokumen/laporan perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Dokumen		1	0	0	0	0	0

II.3.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Kebijakan	Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026		
				2020		2022		2023			TARGET	
				2020	2022	2023	2024	2025	2026			
	Jumlah Dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur	Dokumen		1						1		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah			6					6		
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan				1	1	1		3		

II.3.4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Kebijakan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026		
				2020		2022		2023			TARGET	
				2020	2022	2023	2024	2025	2026			
	Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur	Dokumen		1						1		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah			6					6		
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan				1	1	1		3		

II.3.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Kebijakan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RRPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026		
				2020		2022		2023			TARGET	
				2020	2022	2023	2024	2025	2026			
	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur	Dokumen		0						0		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RRPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan			1	1	1	1		4		

II.3.5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPJ)

Kebijakan	Terusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026		
				2020		2022		2023			TARGET	
				2020	2022	2023	2024	2025	2026			
	Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Dokumen		1						1		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Dokumen			1	1	1	1		4		

II.3.6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Kebijakan	Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026		
				2020		2022		2023			TARGET	
				2020	2022	2023	2024	2025	2026			
	Jumlah Dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Kewilayahan	Dokumen		1						1		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah			7					7		
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan				1	1	1		3		

II.3.7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Kewilayahan

Kebijakan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026		
				2020		2022		2023			TARGET	
				2020	2022	2023	2024	2025	2026			
	Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Kewilayahan	Dokumen		1						1		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah			7					7		
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan				1	1	1		3		

II.3.8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Kebijakan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RRPD/RPJMD pada Bidang kewilayahan	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL						Kondisi Kinerja pada Tahun 2026		
				2020		2022		2023			TARGET	
				2020	2022	2023	2024	2025	2026			
	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	Dokumen		1						1		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RRPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan			1	1	1	1		4		

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022
TRIWULAN IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)										
				7		6		8				9				12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
PERENCANAAN																																
	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian pembangunan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	58.459.564.380			100 %	7.727.342.775			894.874.880			2.003.884.315						7.261.970.974			93,88%	0,00	7.066.140.974			12,09%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	55	1.630.000.000			10 dokumen	13.699.900						3.859.200							13.699.900			100,00%	0,00	13.699.900			5,19%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	17	370.000.000			3 dokumen	2.709.900						2.709.900	2,00						1			3,00	2.709.900	100,00%	100,00%	3,00	2.709.900	17,65%	0,73%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	5	210.000.000			1 dokumen	2.639.600						-	0,80						0,20	2.639.600	1,00	2.639.600	100,00%	100,00%	1,00	2.639.600	20,00%	1,26%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	210.000.000			1 dokumen	3.383.200						-	0,80						0,20	3.383.200	1,00	3.383.200	100,00%	100,00%	1,00	3.383.200	20,00%	1,61%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	5	210.000.000			1 dokumen	2.024.600						-	0,80						0,20	2.024.600	1,00	2.024.600	100,00%	100,00%	1,00	2.024.600	20,00%	0,96%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	210.000.000			1 dokumen	1.304.300						-	0,80						0,20	1.304.300	1,00	1.304.300	100,00%	100,00%	1,00	1.304.300	20,00%	0,62%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	210.000.000			2 dokumen	1.495.300			2			-	1.006.300						-	489.000	2,00	1.495.300	100,00%	100,00%	2,00	1.495.300	20,00%	0,71%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA	5	210.000.000			1 dokumen	143.000			1			-	143.000						-	1,00	143.000	100,00%	100,00%	1,00	143.000	20,00%	0,07%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah	5	29.827.433.415			38 orang	5.222.876.504						852.969.458	1.330.830.710							5.006.836.480			95,88%	0,00	5.006.836.480			17,70%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	29.370.433.415	0,00		14 bulan	5.221.828.604			3	852.969.458	4	1.330.830.710	4	1.362.875.059	3	1.459.113.353	14,00	5.005.788.580	100,00%	95,86%	14,00	5.005.788.580	100,00%	100,00%	14,00	5.005.788.580	100,00%	17,04%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	267.000.000	0,00		1 dokumen	629.400							-		1,00	629.400	1,00	629.400	100,00%	100,00%	1,00	629.400	20,00%	0,24%						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/s emesteran	5	100.000.000	0,00		1 dokumen	418.500							1,00			418.500	1,00	418.500	100,00%	100,00%	1,00	418.500	20,00%	0,42%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKP		
					6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah	15	520.000.000	-	-	1 dokumen	349.500	-	-	349.500	-	-	-	-	349.500	100,00%	100,00%	349.500	0,39%						
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah	5	90.000.000	0,00	-	1 laporan	349.500	1	-	-	349.500	-	-	-	1,00	349.500	100,00%	100,00%	1,00	349.500	20,00%	0,39%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	70	2.980.000.000	-	-	74 orang	144.956.000	-	-	-	-	-	-	-	94.070.000	64,90%	64,90%	94.070.000	21,41%						
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	70	730.000.000	-	-	- bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	7,89%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	90	900.000.000	0,00	-	6 orang	55.104.000	-	-	-	-	1	2.090.000	5	48.580.000	6,00	50.670.000	100,00%	91,95%	6,00	50.670.000	6,67%	5,63%		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	425	550.000.000	-	-	74 orang	89.852.000	-	-	-	-	-	74	43.400.000	74,00	43.400.000	100,00%	48,30%	74,00	43.400.000	17,41%	7,89%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12	6.654.734.036	-	-	12 bulan	624.668.397	-	-	237.564.400	-	-	-	-	623.283.674	99,78%	99,78%	623.283.674	72,93%						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	60	140.000.000	0,00	-	12 bulan	10.872.900	3	-	3	-	3	10.872.900	3	-	12,00	10.872.900	100,00%	100,00%	12,00	10.872.900	20,00%	7,77%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	60	1.100.000.000	0,00	-	12 bulan	181.648.594	3	-	3	93.078.600	3	59.087.800	3	29.482.194	12,00	181.648.594	100,00%	100,00%	12,00	181.648.594	20,00%	16,51%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan kebutuhan alat	60	250.000.000	-	-	12 bulan	14.364.800	3	-	3	9.037.700	3	-	3	5.327.100	12,00	14.364.800	100,00%	100,00%	12,00	14.364.800	20,00%	5,75%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	60	600.000.000	0,00	-	12 bulan	87.783.100	3	-	3	31.435.600	3	26.958.000	3	29.387.000	12,00	87.780.600	100,00%	100,00%	12,00	87.780.600	20,00%	14,63%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	290.000.000	0,00	-	12 bulan	47.612.600	3	-	3	20.318.800	3	12.254.600	3	14.970.000	12,00	47.543.400	100,00%	99,85%	12,00	47.543.400	20,00%	16,39%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	250.000.000	0,00	-	12 bulan	29.680.000	3	-	3	11.825.000	3	7.095.000	3	9.460.000	12,00	28.380.000	100,00%	95,62%	12,00	28.380.000	20,00%	11,35%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SK	
					6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	4.024.734.036	0,00	-	12 bulan	252.706.403	3	-	3	71.868.700	3	85.633.700	3	95.190.980	12,00	252.693.380	100,00%	99,99%	12,00	252.693.380	20,00%	6,28%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	344	6.902.297.814			40 unit	204.678.600										195.830.000		95,68%		195.830.000			
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeleur kantor	115	600.000.000			24 unit	61.289.000	-	-	-	-	-	-	24	60.000.000	24,00	60.000.000	100,00%	97,90%	24,00	60.000.000	20,87%	10,00%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	81	830.000.000			15 unit	143.389.600	-	-	-	-	-	-	13	135.830.000	13,00	135.830.000	86,67%	94,73%	13,00	135.830.000	16,05%	16,37%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	60	5.495.000.000			12 bulan	985.795.200				340.589.200						829.404.460		84,14%		829.404.460		28,02%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	60	45.000.000	0,00	-	12 bulan	2.340.000	3	-	3	2.340.000	3	-	3	-	12,00	2.340.000	100,00%	100,00%	12,00	2.340.000	20,00%	5,20%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	220.000.000	0,00	-	12 bulan	14.740.000	3	-	3	8.709.200	3	1.888.950	3	1.888.950	12,00	12.487.100	100,00%	84,72%	12,00	12.487.100	20,00%	5,68%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah	15	480.000.000	0,00	-	- event	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran	60		0,00	-	12 bulan		3		3		3				12,00		100,00%		12,00	814.577.360	20,00%	17,15%	
			Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor	60				12 bulan		3		3		3			12,00		100,00%		12,00	-	20,00%	0,00%		
			Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor	60				12 bulan		3		3		3			12,00		100,00%		12,00	-	20,00%	0,00%		
			Jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir	60				12 bulan		3		3		3			12,00		100,00%		12,00	-	20,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan pemeliharaan barang milik daerah	140	4.450.099.115			65 unit	530.318.674				41.905.422						498.496.960		94,00%		498.496.960		58,03%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SK		
					6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan	1	250.000.000			1 unit	38.530.000	-	-	-	-	1	31.758.160	-	6.770.355	1,00	38.528.515	100,00%	100%	1,00	38.528.515	100,00%	15,41%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan	27	1.800.099.115	0,00	-	20 unit	222.062.856	7	34.753.422	1	88.391.305	9	20.178.718	3	49.901.000	20,00	193.224.445	100,00%	87,01%	20,00	193.224.445	74,07%	10,73%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	208	650.000.000	0,00	-	42 unit	42.225.818	29	7.152.000	13	2.300.000	-	-	-	30.227.000	42,00	39.679.000	100,00%	93,97%	42,00	39.679.000	20,19%	6,10%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	8	850.000.000			1 unit	85.000.000	-	-	-	-	-	-	1	84.930.000	1,00	84.930.000	100,00%	99,92%	1,00	84.930.000	12,50%	9,99%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala	4	900.000.000			1 unit	142.500.000	-	-	-	-	-	-	1	142.135.000	1,00	142.135.000	100,00%	99,74%	1,00	142.135.000	25,00%	15,79%		
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	7.925.000.000			100 %	816.809.200										665.074.553		81,44%		665.074.553		8,39%		
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	23	8.425.000.000			3 dokumen	484.406.052				148.543.690						401.609.155		82,91%		401.609.155		16,48%		
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah	5	1.500.000.000			- dokumen	-				-						-		0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah konsultasi publik yang dilaksanakan	8	950.000.000			1 forum	4.580.000	1	-	-	4.580.000	-	-	-	-	-	1,00	4.580.000	100,00%	100,00%	1,00	4.580.000	12,50%	0,48%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKP	
					6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah forum OPD yang dilaksanakan	8	985.000.000			1 forum	36.959.500	1	-	-	36.959.500	-	-	-	-	1,00	36.959.500	100,00%	100,00%	1,00	36.959.500	12,50%	3,75%	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan pra dan pasca musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan musrenbang tingkat Nasional	18	1.490.000.000			3 kali	50.822.552	1	-	2	47.518.500	-	3.304.052	-	-	3,00	50.822.552	100,00%	100,00%	3,00	50.822.552	16,67%	3,41%	
		Koordinasi Penyusunan dan Panetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen manajemen resiko pelaksanaan rencana pembangunan daerah	18	3.500.000.000			1 dokumen	392.044.000					1				1,00	309.247.103	100,00%	78,88%	1,00	309.247.103	5,56%	8,84%	
			Jumlah dokumen RKPD dan dokumen perubahan RKPD yang disusun				2 dokumen				1							2,00				100,00%	2,00		0,00%	0,00%
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	10	2.000.000.000			1 dokumen	199.766.000										150.633.531		75,40%		150.633.531		0	
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembangunan daerah	5	1.000.000.000			1 masukan	199.766.000						1,00	150.633.531	1,00	150.633.531	100,00%	75,40%	1,00	150.633.531	20,00%	15,06%		
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang urusan perencanaan	5	1.000.000.000			100 %	132.437.148				6.060.000						112.831.867		85,20%		112.831.867		11,28%	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	5	1.000.000.000			1 dokumen	132.437.148			0,50	6.060.000		4.487.000	0,50	102.284.867	1,00	112.831.867	100,00%	85,20%	1,00	112.831.867	20,00%	11,28%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SKP
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	1.400.000.000			1 dokumen	164.077.000	-	-	0,70	52.083.484	-	45.096.000	0,30	62.997.300	1,00	160.176.784	100,00%	97,62%	1,00	160.176.784	20,00%	11,44%	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah bidang perekonomian	5	1.100.000.000			1 dokumen	42.892.300	-	-	0,35	-	0,50	18.450.000	0,15	18.560.000	1,00	37.010.000	100,00%	86,29%	1,00	37.010.000	20,00%	3,36%	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian	5	1.150.000.000			2 dokumen	117.652.000	-	-	0,50	1.327.500	1	20.582.100	0,50	87.792.800	2,00	109.702.400	100,00%	93,24%	2,00	109.702.400	40,00%	9,54%	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan wilayah	40	10.753.582.897			8 dokumen	674.465.602	-	-	-	197.244.480	-	-	-	-	-	654.943.442	-	97,11%	-	654.943.442	-	39,31%	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	1.443.414.700			1 dokumen	90.705.000	-	-	0,50	46.447.400	0,25	36.747.200	0,25	7.460.000	1,00	90.654.600	100,00%	99,94%	1,00	90.654.600	20,00%	6,28%	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	5	875.000.000			1 dokumen	10.000.000	-	-	-	-	1,00	8.164.700	-	-	1,00	8.164.700	100,00%	81,65%	1,00	8.164.700	20,00%	0,93%	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	5	1.145.269.500			1 dokumen	35.000.000	-	-	-	-	1,00	-	-	34.850.000	1,00	34.850.000	100,00%	99,57%	1,00	34.850.000	20,00%	3,04%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		SK	
					6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	5	1.964.082.512			1 dokumen	333.326.550	-	-	0,50	86.652.300	0,25	98.889.488	0,25	137.188.776	1,00	322.730.564	100,00%	96,82%	1,00	322.730.564	20,00%	16,43%	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	1.405.000.000			1 dokumen	38.336.400	-	-	0,50	6.308.000	0,25	25.827.360	0,25	4.104.100	1,00	36.239.460	100,00%	94,53%	1,00	36.239.460	20,00%	2,58%	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	5	875.000.000			1 dokumen	10.000.000	-	-	-	-	1,00	3.364.700	-	4.880.000	1,00	8.244.700	100,00%	82,45%	1,00	8.244.700	20,00%	0,94%	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	5	1.125.571.200			1 dokumen	30.000.000	-	-	0,50	8.100.000	0,25	-	0,25	21.150.000	1,00	29.250.000	100,00%	97,50%	1,00	29.250.000	20,00%	2,60%	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	5	1.920.224.985			1 dokumen	127.097.652	-	-	0,50	49.736.780	0,25	4.789.700	0,25	70.282.938	1,00	124.809.418	100,00%	98,20%	1,00	124.809.418	20,00%	6,50%	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																										
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelibangan yang implementatif	2	10.080.000.000			20 %	188.379.150				42.878.552						134.286.700				134.286.700			
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	5	860.000.000			1 dokumen	108.391.300				10.079.392						75.495.176		69,65%		75.495.176		8,76%	

**LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
PER 30 SEPTEMBER 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab						
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
PERENCANAAN																														
	Tenwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian pembangunan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100%	58,459,564,380			100 %	9,534,494,484			1,470,079,147			2,965,294,093					9,130,663,553			95.76%	0.00	14,799,965,767			25.32%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	55	1,630,000,000	10	13,699,900	10 dokumen	13,912,400	1.50	-	2.00	-	4.50	-	2	13,777,400	10	13,777,400	99%	20	27,477,300	36%	1.69%						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	17	370,000,000	3	2,709,900	3 dokumen	2,712,800	1.00	-	-	-	1.00	-	1.00	2,712,800	3.00	2,712,800	100.00%	100.00%	6.00	5,422,700	35.29%	1.47%					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	210,000,000	1	2,639,600	1 dokumen	2,639,600	-	-	-	-	1.00	-	-	2,504,600	1.00	2,504,600	100.00%	94.89%	2.00	5,144,200	40.00%	2.45%					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	210,000,000	1	3,383,200	1 dokumen	3,425,700	-	-	-	-	1.00	-	-	3,425,700	1.00	3,425,700	100.00%	100.00%	2.00	6,808,900	40.00%	3.24%					
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	210,000,000	1	2,024,600	1 dokumen	2,059,000	-	-	-	-	1.00	-	-	2,059,000	1.00	2,059,000	100.00%	100.00%	2.00	4,083,600	40.00%	1.94%					
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	210,000,000	1	1,304,300	1 dokumen	1,335,900	-	-	-	-	1.00	-	-	1,335,900	1.00	1,335,900	100.00%	100.00%	2.00	2,640,200	40.00%	1.26%					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	210,000,000	2	1,495,300	2 Laporan	1,562,800	-	-	2.00	-	-	-	-	1,562,800	2.00	1,562,800	100.00%	100.00%	4.00	3,058,100	40.00%	1.46%					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	210,000,000	1	143,000	1 Laporan	176,600	0.50	-	-	-	0.50	-	-	176,600	1.00	176,600	100.00%	100.00%	2.00	319,600	40.00%	0.15%					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	29,827,433,415	38	5,006,836,480	9 Laporan	5,989,007,360	987,862,233	2,349,901,247	5.59	836,537,817	15	1,496,444,009	5,670,745,306	94.69	10,677,581,786	-	36%										
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	29,370,433,415	14	5,005,788,580	40 orang	5,987,960,260	6.63	987,862,233	15.77	2,349,901,247	5.59	836,537,817	12.02	1,495,396,909	40.00	5,669,698,206	100.00%	94.68%	54.00	10,675,486,786	385.71%	36.35%					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	267,000,000	1	629,400	1 dokumen	628,600	-	-	1.00	-	-	-	628,600	1.00	628,600	100.00%	100.00%	2.00	1,258,000	40.00%	0.47%						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	100,000,000	1	418,500	7 Laporan	418,500	-	-	4.00	-	-	-	418,500	7.00	418,500	100.00%	100.00%	8.00	837,000	160.00%	0.84%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab			
							I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15	520,000,000	1.00	349,500	2 Laporan	349,500					2	349,500		349,500.00	100.00%	1.00	699,000	7%	0.13%				
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	90,000,000	1	349,500	2 Laporan	349,500	-		1.00			1.00	349,500	2.00	349,500	100.00%	100.00%	3.00	699,000	60.00%	0.78%		
		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawalan Perangkat Daerah	70	2,980,000,000		50,670,000	10 orang	235,718,200			3,740,000	58,942,848		171,955,060		234,637,908	99.54%	0.00	285,307,908	0.00%	9.57%				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90	900,000,000	6	50,670,000	60 orang	235,718,200	-		2.00	3,740,000	15.00	58,942,848	43.00	171,955,060	60.00	234,637,908	100.00%	99.54%	66.00	285,307,908	73.33%	31.70%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	6,654,734,036	12	608,918,874	12 bulan	748,281,774		188,687,330		220,332,013		150,494,574		174,701,534		734,215,451.00	98.12%	12.00	1,343,134,325	100.00%	20.18%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	60	140,000,000	12	10,872,900	2 paket	10,976,672	1.00	8,639,300	-			1.00	-	2.00	8,639,300	100.00%	78.71%	14.00	19,512,200	23.33%	13.94%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60	1,100,000,000	12	181,648,594	1 paket	165,812,500	0.30	49,131,200	0.59	97,024,100	0.03	5,060,000	0.09	12,650,000	1.00	163,865,300	100.00%	98.83%	13.00	345,513,894	21.67%	31.41%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	60	250,000,000	12	14,364,800	1 paket	23,651,000	0.80	11,592,800	-			0.20	9,481,000	1.00	21,073,900	100.00%	89.10%	13.00	35,438,600	21.67%	14.18%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	60	600,000,000	12	87,780,600	1 paket	110,399,400	0.25	22,709,000	0.25	22,325,000	0.28	31,000,000	0.22	31,706,000	1.00	107,740,000	100.00%	97.59%	13.00	195,520,600	21.67%	32.59%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60	290,000,000	12	47,543,400	1 paket	42,634,200	0.92	25,540,500	0.05	1,350,000	-		0.03	15,316,400	1.00	42,206,900	100.00%	99.00%	13.00	89,750,300	21.67%	30.95%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60	250,000,000	12	28,380,000	1 Dokumen	29,680,000	0.25	3,690,000	0.25	9,300,000	0.15	4,330,000	0.35	8,660,000	1.00	25,980,000	100.00%	87.53%	13.00	54,360,000	21.67%	21.74%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	4,024,734,036	12	252,693,380	1 Laporan	365,128,002	0.25	67,384,530	0.58	90,332,913	0.17	110,104,574	-	96,888,134	1.00	364,710,151	100.00%	99.89%	13.00	617,403,531	21.67%	15.34%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	344	6,902,297,814			69 unit	860,731,500		125,160,000		26,184,000				689,233,000		840,577,000	97.66%	0.00	840,577,000		0.12		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	600,000,000	0.00		1 unit	125,208,000	1.00	125,160,000	-					-	1.00	125,160,000	100.00%	99.96%	1.00	125,160,000	100.00%	20.86%	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Paket	95,500,000									1.00	94,710,000	100.00%	0.00%					
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	81	830,000,000	13	135,830,000	42 unit	640,023,500	-		1.00	26,184,000			41.00	594,523,000	42.00	620,707,000	100.00%	96.98%	55.00	756,537,000	67.90%	91.15%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	5,495,000,000		829,404,460	12 bulan	946,698,500		204,376,930		232,590,779		143,520,704		345,628,396		926,116,809	97.83%	0.00	1,755,521,269	0%	32%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	45,000,000	12	2,340,000	1 Laporan	5,340,000	1.00	2,340,000	-				3,000,000	1.00	5,340,000	100.00%	100.00%	13.00	7,680,000	21.67%	17.07%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	60	220,000,000	12	12,487,100	1 Laporan	21,790,000	0.25	2,226,450	0.58	8,232,919	0.08	1,715,465	0.09	2,504,457	1.00	14,679,291	100.00%	67.37%	13.00	27,166,391	21.67%	12.35%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	480,000,000	0		1 Laporan										1.00		100.00%	0.00%	1.00		6.67%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	4,750,000,000	12	814,577,360	1 Laporan	919,568,500	0.22	199,810,480	0.24	224,357,860	0.15	141,805,239	0.38	340,123,939	1.00	906,097,518	100.00%	98.54%	13.00	1,720,674,878	21.67%	36.22%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab										
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14= 6 + 12			15=14/5 x100%									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	140	4,450,099,115			140 unit	739,795,250			89,152,654			158,730,054			38,510,971			423,850,500			710,244,179.00			96.01%	0.00	710,244,179	0.00%	15.96%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	250,000,000	1	38,528,515	1 unit	38,530,000	0.25	4,200,000	0.25	8,900,000	0.25	3,300,000	0.25	8,500,000	1.00	24,900,000	100.00%	64.62	2.00	63,428,515	200.00%	25.37%									
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	1,800,099,115	20	193,224,445	20 unit	316,130,000	5.23	82,652,654	8.62	136,173,054	2.23	35,210,971	3.93	60,995,500	20.00	315,032,179	100.00%	99.65%	40.00	508,256,624	148.15%	28.23%									
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	208	650,000,000	42	39,679,000	24 unit	65,135,250	1.41	2,300,000	8.39	13,657,000	-	-	14.20	34,528,000	24.00	50,585,000	100.00%	77.66%	66.00	90,264,000	31.73%	13.89%									
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	120,000,000							1.00	119,785,000	1.00	119,785,000	100.00%	99.82													
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	200,000,000							1.00	199,942,000	1.00	199,942,000	100.00%	99.97													
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	7,925,000,000			100 %	1,311,363,300			147,631,375			82,404,854						1,046,290,981						79.79%		1,711,365,534		21.59%			
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	23	8,425,000,000			5 dokumen	1,073,500,000			132,360,305			66,738,627			176,639,470			453,334,182						829,072,584		77.23%		1,230,681,739		0.54	
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	5	1,500,000,000	0.00	-	3 dokumen	100,000,000	1.00	9,674,557	0.22	5,537,000	1.50	30,172,420	0.28	38,211,600	3.00	83,595,577	100.00%	83.60%	3.00	83,595,577	60.00%	5.57%									
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	8	950,000,000	1.00	4,580,000	2 Berita Acara	60,000,000	1.00	10,000,000	-	-	1.00	12,500,000	-	8,371,000	2.00	30,871,000	100.00%	51.45%	3.00	35,451,000	37.50%	3.73%									
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	8	985,000,000	1.00	36,959,500	1 Berita Acara	43,500,000	1.00	43,500,000	-	-	-	500,000	-	(500,000)	1.00	43,500,000	100.00%	100.00%	2.00	80,459,500	25.00%	8.17%									
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	18	1,490,000,000	3.00	50,822,552	2 Berita Acara	170,000,000	1.00	14,700,000	0.25	26,898,848	0.75	28,725,500	(0.00)	65,999,132	2.00	136,323,480	100.00%	80.19%	5.00	187,146,032	27.78%	12.56%									
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	18	3,500,000,000	2.00	309,247,103	4 dokumen	700,000,000	0.33	54,485,748	0.21	34,302,779	2.00	104,741,550	1.46	341,252,450	4.00	534,782,527	100.00%	76.40%	6.00	844,029,630	33.33%	24.12%									
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	10	2,000,000,000			1 dokumen	102,227,500					6,050,000		7,914,000		77,329,300			91,293,300						89.30%		241,926,831		0			
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5	1,000,000,000	1	150,633,531	1 masukan	102,227,500				0.03	6,050,000	0.08	7,914,000	0.89	77,329,300	1.00	91,293,300	100.00%	89.30%	2.00	241,926,831	40.00%	24.19%								
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang urusan perencanaan	5	1,000,000,000			100 %	135,635,800			15,271,070			15,668,227		8,702,000				86,285,800						125,925,097		92.84%		238,756,964		23.88%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab					
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%			14=6+12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	5	1,000,000,000	1	112,831,867	3 Laporan	135,635,800	0.25	15,271,070	0.50	15,666,227	2.00	8,702,000	0.25	86,285,800	3.00	125,925,097	100.00%	92.84%	4.00	238,756,964	80.00%	23.88%		
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1	14,447,281,449			100 %	1,781,192,210		193,227,322		339,766,459		272,151,712				1,695,165,625		95.17%		2,801,480,672				
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	40	9,041,000,000			4 dokumen	438,429,816		47,419,948		108,885,673		77,491,018		168,691,900		400,488,539		91.35%		644,809,850		54.72%		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	1,350,000,000	1	91,928,566	1 dokumen	96,635,027	0.15	14,843,867	0.19	18,614,500	0.16	15,220,518	0.50	45,131,400	1.00	93,810,305	100.00%	97.08%	2.00	185,738,871	40.00%	13.76%		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah	5	900,000,000	0	-	4 Perangkat Daerah	4,200,000	-	-	1.67	1,750,000	-	-	2.33	-	4.00	1,750,000	100.00%	41.67%	4.00	1,750,000	80.00%	0.19%		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	5	1,125,000,000	2	105,321,000	1 Laporan	6,601,600	-	-	-	-	-	1.00	2,211,600	1.00	2,211,600	100.00%	33.50%	3.00	107,532,600	60.00%	9.56%			
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	5	1,167,000,000	0	-	1 Laporan	44,363,224	-	-	0.27	12,030,000	0.27	12,030,000	0.46	17,074,000	1.00	41,134,000	100.00%	92.72%	1.00	41,134,000	20.00%	3.52%		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	1,365,000,000	0	-	1 dokumen	75,411,000	0.18	13,570,855	0.10	7,881,000	-	-	0.72	52,003,400	1.00	73,455,255	100.00%	97.41%	1.00	73,455,255	20.00%	5.38%		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5	900,000,000	0	-	10 Perangkat Daerah	10,968,000	0.62	675,000	3.78	4,150,000	-	-	5.60	4,750,000	10.00	9,575,000	100.00%	87.30%	10.00	9,575,000	200.00%	1.06%		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5	1,104,000,000	1	77,907,500	10 Perangkat Daerah	69,419,765	-	-	-	-	5.74	39,822,000	4.26	24,772,400	10.00	64,594,400	100.00%	93.05%	11.00	142,501,900	220.00%	12.91%		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	5	1,130,000,000	2	95,078,500	1 Laporan	130,831,200	0.14	18,330,206	0.48	62,460,173	0.08	10,418,500	0.30	22,749,100	1.00	113,957,979	100.00%	87.10%	3.00	209,036,479	60.00%	18.50%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5			6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14= 6 + 12			15=14/5 x100%	
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber daya alam)	40	9,100,000,000		4 dokumen	573,621,300		21,097,400		66,906,886		33,223,678		372,768,669		536,684,133		93.56%		743,734,427		59.96%			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	1,400,000,000	1	160,176,784	1 dokumen	162,038,934	0.11	17,417,400	0.20	32,681,700	0.19	30,193,678	0.50	81,196,679	1.00	161,489,457	100.00%	99.66%	2.00	321,666,241	40.00%	22.98%		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5	900,000,000	0	-	8 Perangkat Daerah	16,773,089	1.76	3,680,000	1.15	2,420,000	-	-	5.09	9,235,000	8.00	15,335,000	100.00%	91.43%	8.00	15,335,000	160.00%	1.70%		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5	1,100,000,000	1	37,010,000	8 Perangkat Daerah	38,485,300	-	-	0.78	3,750,000	-	-	7.22	30,379,000	8.00	34,129,000	100.00%	88.68%	9.00	71,139,000	180.00%	6.47%		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JPMD pada Bidang Perekonomian	5	1,150,000,000	2	109,702,400	4 Laporan	249,314,100	-	-	0.45	28,055,186	0.05	3,030,000	3.50	210,141,600	4.00	241,226,786	100.00%	96.76%	6.00	350,929,186	120.00%	30.52%		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	5	1,400,000,000	0	-	4 Dokumen	60,514,100	0.06	980,000	1.90	28,736,500	0.29	4,351,000	1.75	20,987,390	4.00	55,054,890	100.00%	90.98%	4.00	55,054,890	80.00%	3.93%		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5	900,000,000	0	-	2 Perangkat Daerah	5,581,677	-	-	0.40	1,120,000	-	-	1.80	2,750,000	2.00	3,870,000	100.00%	69.33%	2.00	3,870,000	40.00%	0.43%		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5	1,100,000,000	0	-	2 Perangkat Daerah	40,914,100	-	-	0.37	7,500,000	-	-	1.63	18,079,000	2.00	25,579,000	100.00%	62.52%	2.00	25,579,000	40.00%	2.33%		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	40	10,753,562,897		10 dokumen	769,141,094		124,709,974		165,973,900		161,437,016		305,872,063		757,992,953		98.55%		1,412,936,395		88.02%			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	1,443,414,700	1	90,654,600	1 dokumen	97,916,194	0.35	34,626,431	0.18	17,734,579	0.14	13,906,000	0.32	28,595,768	1.00	94,862,778	100.00%	96.88%	2.00	185,517,378	40.00%	12.85%		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5	875,000,000	1	8,164,700	6 Perangkat Daerah	10,000,000	2.93	4,875,000	-	-	-	-	3.08	3,900,000	6.00	8,775,000	100.00%	87.75%	7.00	16,939,700	140.00%	1.94%		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5	1,145,269,500	1	34,850,000	6 Perangkat Daerah	65,180,500	0.17	1,800,000	1.23	13,350,000	1.50	16,325,100	3.10	32,960,900	6.00	64,436,000	100.00%	98.86%	7.00	99,286,000	140.00%	8.67%		

No	Sasaran RKPD	Programi/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada bidang Infrastruktur	5	1,964,082,512	1	322,730,564	4 Laporan	295,086,500	0.96	70,750,543	0.94	69,407,600	0.75	55,276,000	1.35	97,202,357	4.00	292,636,500	100.00%	99.17%	5.00	615,367,064	100.00%	31.33%		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	5	1,405,000,000	1	36,239,460	1 dokumen	114,780,500	0.06	7,300,200	0.08	9,307,558	0.39	44,946,816	0.46	50,805,200	1.00	112,359,774	100.00%	97.89%	2.00	148,599,234	40.00%	10.58%		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5	875,000,000	1	8,244,700	7 Perangkat daerah	10,000,000	1.05	1,500,000	3.85	5,500,000	-	-	2.10	2,800,000	7.00	9,800,000	100.00%	98.00%	8.00	18,044,700	160.00%	2.06%		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5	1,125,571,200	1	29,250,000	7 Perangkat Daerah	65,180,500	-	-	1.39	12,900,000	1.75	16,325,100	3.86	35,243,900	7.00	64,469,000	100.00%	98.91%	8.00	93,719,000	160.00%	8.33%		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada bidang Kewilayahan	5	1,920,224,985	1	124,809,418	1 dokumen	110,996,900	0.03	3,857,800	0.34	37,774,163	0.13	14,658,000	0.49	54,363,938	1.00	110,653,901	100.00%	99.69%	2.00	235,463,319	40.00%	12.26%		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																											
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	2	10,080,000,000			20 %	289,800,263		46,222,401		30,412,579		9,422,000		182,703,970		268,760,950		92.74		370,813,850				
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	5	860,000,000	1	75,495,176	1 dokumen	155,381,334		6,523,681		12,371,579		9,422,000		116,782,606		145,099,866		93.38%		220,595,042		25.65%		
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik	5	860,000,000	1	75,495,176	1 laporan	155,381,334	0.04	6,523,681	0.08	12,371,579	0.06	9,422,000	0.82	116,782,606	1.00	145,099,866	100.00%	93.38%	2.00	220,595,042	40.00%	25.65%		
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi	10	920,000,000		58,791,524	3 dokumen	134,418,929		39,698,720		18,041,000		-		65,921,384		123,661,084		92.00%		150,018,608		31.25%		
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif	5	480,000,000	1	58,791,524	1 Laporan	92,796,929	0.43	39,698,720	0.19	18,041,000	-	-	0.38	33,487,364	1.00	91,227,084	100.00%	98.31%	2.00	150,018,608	40.00%	31.25%		
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	5	440,000,000	0.00	-	1 Laporan	41,622,000	-	-	-	-	-	-	1.00	32,434,000	1.00	32,434,000	100.00%	77.93%	1.00	32,434,000	20.00%	7.37%		
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	93.99%								
																Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
																JUMLAH		12,140,881,109	100.00%	93.99%							
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		12,140,881,109	100.00%	93.99%							
																PREDIKAT KINERJA DAN SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								

No.	INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Catatan: Total anggaran yang digunakan pada Triwulan III ini adalah anggaran sesuai DPPA Tahun 2023, demikian juga dengan persentase realisasi terhadap total anggaran tersebut



Dumai, Desember 2023
KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI

DR. BUDHI HASNUL, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19740213 199303 1 002

